

## BAB IV

### EKSES KRISIS FINANSIAL 2008 TERHADAP PEREKONOMIAN GLOBAL

#### IV.1 Konstelasi Perekonomian Global

Sejak berakhirnya perang dingin antara kubu kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan kubu komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet, paham liberalisme yang mengusung paradigma perdagangan bebas berkembang dengan pesat, terutama dengan adanya arus globalisasi yang ditandai dengan inovasi di bidang teknologi, telekomunikasi dan transportasi. Jumlah Negara-negara yang tergabung dalam konstelasi perdagangan internasional semakin meningkat.

Sistem perdagangan internasional yang semakin bebas merupakan salah satu manifestasi dari teori *comparative advantage* yang dipopulerkan oleh David Ricardo. dalam teorinya mendukung penerapan sistem ekonomi terbuka (*open economy*) dibandingkan dengan penerapan sistem ekonomi tertutup. Menurut teori *comparative advantage*, yang dimaksud dengan sistem perekonomian terbuka secara umum adalah sistem perekonomian yang mengakomodasi pertukaran hasil produksi suatu negara, berupa barang dan jasa, dengan negara lainnya. Pertukaran barang dan jasa yang dilakukan antar negara akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Negara-negara tersebut dibandingkan jika Negara-negara tersebut berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Lebih lanjut menurut David Ricardo, setiap negara memiliki kelebihan, oleh karenanya sebaiknya masing-masing negara memfokuskan diri untuk memproduksi komoditas unggulan mereka. Sedangkan, kebutuhan akan komoditas yang lain dapat dipenuhi melalui proses barter, dengan demikian efektifitas produksi akan tercapai dan setiap konsumen akan mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan kualitas terbaik.

Pada dasarnya, konsep perekonomian terbuka yang dipopulerkan, selain bertujuan untuk mendistribusikan barang dengan kualitas terbaik dan dengan harga yang terbaik pula kepada konsumen serta meningkatkan efektifitas produksi, namun, konsep ini juga bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan secara lebih merata dan menumbuhkembangkan perekonomian Negara-negara di dunia. Berbeda dengan sistem

perekonomian tertutup, dimana pangsa pasar produksi negara tersebut adalah penduduknya sendiri, sistem perekonomian terbuka memberikan peluang kepada masing-masing negara untuk membidik pangsa pasar baru, yaitu penduduk Negara-negara lain, dan meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi masing-masing negara.

Dalam perkembangannya, lalu lintas pertukaran barang dan jasa semakin cepat berkat kontribusi perkembangan teknologi dan informasi. Volume perdagangan internasional pun meningkat dan jumlah Negara-negara yang menganut sistem perekonomian terbuka pun semakin banyak, terutama setelah era perang dingin berakhir yang ditandai oleh 'kemenangan' kubu Amerika Serikat dan sekutunya. Satu demi satu negara bekas blok Soviet membuka ekonominya dan meninggalkan sistem perekonomian tertutup yang menjadi salah satu ciri penerapan paham sosialisme-komunisme di bidang ekonomi.<sup>1</sup> Uni Soviet, yang kemudian berubah menjadi Rusia pun ikut membuka perekonomiannya dan mengintegrasikan diri perekonomian global setelah pada era perang dingin, menjadi negara pemimpin blok timur dan hubungan berbagai negara pun semakin terbuka dan erat.

Sistem perekonomian terbuka semakin gencar dipopulerkan kepada Negara-negara di dunia, terutama kepada berbagai negara dunia ketiga yang sebelumnya "terisolasi" dari struktur perdagangan internasional. Disintegrasi perekonomian dunia ketiga dari struktur perekonomian internasional dianggap sebagai salah satu penyebab terhambatnya kemajuan ekonomi kelompok Negara-negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi mereka tidak sepesat Negara-negara maju ataupun kelompok negara berkembang dan kelompok negara industri baru karena kurangnya akses pemasaran, transfer teknologi, akses pendanaan dan akses untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih murah. Sehingga, kesempatan untuk memacu pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) yang dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan rakyat, sangat terbatas atau bahkan tidak ada. Oleh karena itu, Negara-negara yang

---

<sup>1</sup> Perlu dicatat bahwa walaupun Negara-negara yang tergabung dalam blok timur menganut sistem perekonomian tertutup, bukan berarti tidak ada sama sekali pertukaran barang dan jasa dengan Negara lain. Pertukaran tetap ada, hanya saja terbatas antara Negara-negara dalam komunitas blok timur dan dengan volume yang tidak besar. Sebagai tambahan, pertukaran yang terjadi lebih bersifat "bantuan" untuk mewujudkan kemandirian. Sebagai pemimpin, Uni Soviet memiliki "kewajiban moral" untuk membantu pengikutnya agar dapat mandiri.

sudah lebih dulu mengadopsi sistem perekonomian terbuka mendorong Negara-negara lain yang kondisi perekonomiannya lebih “terbelakang” untuk membuka diri.

Akan tetapi, tujuan yang diharapkan dari meleburnya Negara-negara tersebut ke dalam struktur perdagangan internasional, ternyata tidak semudah itu dapat terwujud hanya dengan membuka perekonomiannya terhadap negara lain. Kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara miskin masih saja terjadi. Bahkan, dengan meningkatnya jumlah negara yang tergabung dalam struktur perdagangan internasional, semakin menjadikan arena tersebut kompetitif dan tidak jarang membuat Negara-negara pendatang baru termarginalisasi. Kecenderungan untuk melakukan proteksi terhadap perekonomian domestik agar tidak tergerus oleh negara lain, disinyalir sebagai faktor penghambat terciptanya kondisi ideal dimana Negara-negara di dunia dapat bersama-sama maju dalam bidang ekonomi. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Negara-negara pendatang baru saja, melainkan juga diterapkan oleh berbagai negara maju, seperti Jepang dan Amerika Serikat<sup>2</sup>. Sebagai langkah untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya kebijakan untuk meminimalisasi halangan-halangan seperti: kebijakan pengenaan bea masuk atau bea impor yang tinggi, pajak atas impor, peraturan perundang-undangan yang menjurus ke arah proteksionisme, penerapan kuota impor, dan lainnya. Justifikasi yang didengungkan adalah proteksionisme adalah penghalang bagi terciptanya perekonomian domestik dan internasional yang lebih baik dan ketidaksempurnaan realisasi dari sistem ekonomi terbuka bukan terletak pada sistem itu sendiri, melainkan berasal dari reaksi proteksionisme dari Negara-negara yang tergabung dalam struktur perdagangan internasional.<sup>3</sup> Sebagai gantinya, pemerintah diharapkan untuk dapat menerapkan kebijakan yang lebih pro terhadap keterbukaan ekonomi guna memperlancar perdagangan internasional, sehingga pertukaran barang dan jasa dapat bergerak lebih bebas. Konsep perdagangan bebas pun menjadi semakin populer dan perekonomian terbuka pun lebih condong menjadi perekonomian pasar bebas. Negara-negara di dunia didorong untuk melakukan liberalisasi perdagangan, dan tidak hanya itu, dorongan

---

<sup>2</sup>Salah satu kebijakan Jepang yang mencerminkan sikap proteksionis adalah penerapan sistem *dumping* yang menjadikan barang-barang impor tidak kompetitif dibandingkan dengan hasil produksi domestik. Sedangkan, Amerika Serikat menerapkan kebijakan proteksionisme dengan menerapkan kuota tekstil kepada China.

<sup>3</sup> WTO *paper Free Trade* by Ludger Schuknecht, Oktober 1998. hlm. 1.

untuk melakukan liberalisasi finansial pun semakin gencar. Apabila liberalisasi perdagangan dan finansial dapat tercapai seutuhnya, maka kondisi perekonomian dunia yang dicita-citakan dapat tercapai.

Perdagangan bebas yang melibatkan arus barang dan jasa, pada perkembangannya diikuti pula oleh pergerakan modal atau uang. Sama halnya dengan liberalisasi perdagangan, liberalisasi finansial dianggap memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Sebagai salah satu komponen dalam penghitungan PDB, investasi atau penanaman modal, diharapkan dapat lebih menggairahkan suatu perekonomian dengan memberikan tambahan modal. Penerapan kebijakan untuk melakukan liberalisasi finansial didukung oleh para investor yang melihat hal ini sebagai sesuatu yang menguntungkan. Pergerakan modal dari satu negara ke negara lainnya didorong oleh tingkat insentif dan tingkat pengembalian yang bervariasi pada setiap negara, sehingga memungkinkan pemodal untuk mendapatkan hasil pengembalian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan para pemodal yang hanya dapat menyalurkan kapitalnya pada satu perekonomian saja. Liberalisasi finansial memberikan keleluasaan bagi pemodal untuk memilih tujuan investasi yang beragam dengan variasi tingkat pengembalian dan tingkat risiko. Penyaluran modal dapat dilakukan melalui pasar modal, memberikan pinjaman luar negeri, penanaman modal secara langsung kepada perusahaan yang membutuhkan, akuisisi dan *merger*, reksa dana dan cara-cara lainnya.

Selain “menguntungkan” bagi para pemodal, kebebasan pergerakan modal juga mempunyai manfaat tersendiri bagi pihak yang menerima limpahan modal tersebut. Baik Negara maupun perusahaan yang mendapatkan tambahan modal asing, dapat memanfaatkan modal tersebut untuk meningkatkan produktifitas barang dan jasa ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang dapat mendorong pergerakan roda-roda perekonomian, sehingga melalui mekanisme rambatan, modal asing yang diterima diharapkan pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan, akses terhadap modal yang lebih luas dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

Namun, pada praktiknya, perdagangan bebas dari segi barang dan jasa maupun dari segi arus modal belum bisa menciptakan kondisi perekonomian global seperti yang



diharapkan. Liberalisasi barang dan jasa masih belum bisa mengangkat kondisi perekonomian Negara-negara miskin yang justru produksi dalam negerinya terancam oleh masuknya barang-barang impor. Ketimpangan yang terjadi antara akses pasar untuk ekspor dan akses pasar domestik untuk barang impor masih terjadi, walaupun proteksionisme tetap dianggap sebagai penyebab terjadinya hal tersebut. Kemudian, pergerakan arus modal yang bebas, ternyata, juga mengandung unsur-unsur risiko yang tidak dapat dipandang sebelah mata saja, terutama arus modal yang bersifat *short-term* atau jangka pendek. Arus modal jangka pendek, baik itu berupa pinjaman ataupun bentuk lain, memiliki tingkat volatilitas dan risiko tinggi yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi. Pergerakan modal jangka pendek dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang, baik dari dalam suatu Negara maupun isu-isu di luar Negara tersebut. dan dapat memicu perilaku *herding behavior* yang kemudian dapat berujung pada arus modal keluar (*capital outflow*) dalam jumlah besar. Sebagai contoh, sebelum terjadinya krisis finansial di Asia pada ahir 90-an, Negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menarik minat para pemodal untuk berinvestasi di kawasan tersebut. Perekonomian yang sedang tumbuh seakan memberikan sinyal kepada para investor-investor bahwa investasi yang mereka lakukan di Negara tersebut akan memberikan hasil pengembalian yang tinggi. Ketika para investor melihat adanya “pasar-pasar” lain yang lebih menguntungkan atau ketika para investor melihat adanya gelagat-gelagat yang menunjukkan bahwa proyeksi ke depan pertumbuhan ekonomi Negara tersebut tidak seagut tahun-tahun sebelumnya, maka bukan tidak mungkin para investor *short-term* menarik modalnya keluar dari Negara tersebut dan mencari lahan lain yang lebih menguntungkan. Penarikan yang dilakukan pemodal besar tentunya akan berdampak pada kondisi finansial Negara tersebut dan dapat berujung pada penarikan modal oleh investor-investor lainnya, sehingga volume *capital outflow* akan menjadi besar dan menekan kurs mata uang domestik yang kemudian berdampak pula terhadap ketersediaan modal dan penurunan devisa Negara secara signifikan. Apabila tidak segera diantisipasi oleh pemerintah maupun bank sentral, maka tidak mustahil bila kemudian Negara tersebut berada dalam kondisi krisis.

Dampak lainnya dari perekonomian pasar bebas adalah peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan mengalami perubahan. Jika pada era sebelum sistem

perekonomian pasar bebas diterapkan, pemerintah diharapkan untuk dapat membawa perekonomian negara ke arah yang lebih baik, kini sebagai tambahannya, pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan perekonomian domestik dengan tidak mengadopsi kebijakan proteksionisme dan kebijakan yang mengakomodir kepentingan internasional sebagai bentuk tanggung jawab anggota struktur perekonomian global. Tantangan terhadap pemerintah juga datang dari kemunculan aktor-aktor global, seperti: perusahaan multinasional, organisasi internasional non-pemerintah, dan lainnya. Peran aktor-aktor tersebut, terutama perusahaan multinasional yang membawa aliran dana segar dalam jumlah yang cukup besar, mempersuasi Negara-negara, terutama negara berkembang, untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan peraturan yang berpihak kepada masuknya dana-dana asing. Jika pada periode-periode sebelumnya masuknya modal asing dibawa dengan bendera suatu negara, pada masa sekarang, tidak jarang masuknya modal asing yang diiringi dengan panji-panji korporasi.

Perusahaan-perusahaan transnasional memberikan warna tersendiri bagi konstelasi perekonomian global. Dilihat dari sisi positifnya, peran perusahaan transnasional seakan memberikan jalur alternatif bagi berbagai negara, khususnya negara berkembang. Pemerintah Negara-negara berkembang berlomba-lomba mengundang perusahaan transnasional untuk memberikan tambahan modal, lapangan kerja, transfer teknologi dan ilmu pengetahuan yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan gairah sektor swasta domestik, serta menjadi daya tarik bagi pemodal-pemodal lain untuk turut berinvestasi di negara tersebut. Namun, kehadiran para perusahaan transnasional juga dapat menimbulkan friksi-friksi ekonomi di suatu negara. Terbatasnya regulasi internasional terhadap perusahaan-perusahaan tersebut seakan memberikan kemudahan bagi mereka untuk bergerak bebas dan pindah dari satu negara berkembang ke negara berkembang lainnya yang didasari oleh orientasi terhadap profit, sehingga dapat menyebabkan ketidakberdayaan Negara-negara tersebut untuk mengontrol pergerakan para perusahaan transnasional.<sup>4</sup> Ketidakberdayaan tersebut bermanifestasi dalam bentuk deregulasi peraturan yang dianggap “tidak ramah” terhadap para perusahaan transnasional, hingga persaingan upah buruh antar Negara berkembang yang tidak jarang berujung pada ketidaksesuaian

---

<sup>4</sup> Kwamena Acquah, *International regulation of transnational corporations: the new reality*, Paeger, 1986, hml 37-43.

upah minimum yang diterima buruh dan kebutuhan hidup. Lebih lanjut lagi, perusahaan transnasional yang mengalirkan modal dalam bentuk pinjaman ataupun “dana segar” ke dalam suatu perekonomian relatif lebih tidak stabil dalam artian bilamana perusahaan tersebut dihadapkan pada situasi krisis, baik yang bersumber dari kondisi internal maupun eksternal perusahaan, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan aksi *risk aversion* atau menghindari risiko. Karena tidak ada insentif bagi mereka ataupun “kewajiban moral” untuk menyelamatkan sebuah perekonomian.

Konsep *Casino Capitalism* yang dipopulerkan oleh Susan Strange mendeskripsikan bagaimana pergerakan modal asing yang sulit dikontrol oleh para pemerintah negara dunia ketiga dapat menyebabkan permasalahan fundamental pada perekonomian domestik Negara-negara tersebut, khususnya modal asing yang memasuki suatu perekonomian melalui jalur finansial. Apabila terjadi sesuatu perkembangan yang berada di luar ekspektasi mereka dan berpotensi mengancam keuntungan yang diperoleh, maka *capital flight* pun tidak dapat dihindarkan dan dapat berujung kepada munculnya krisis.

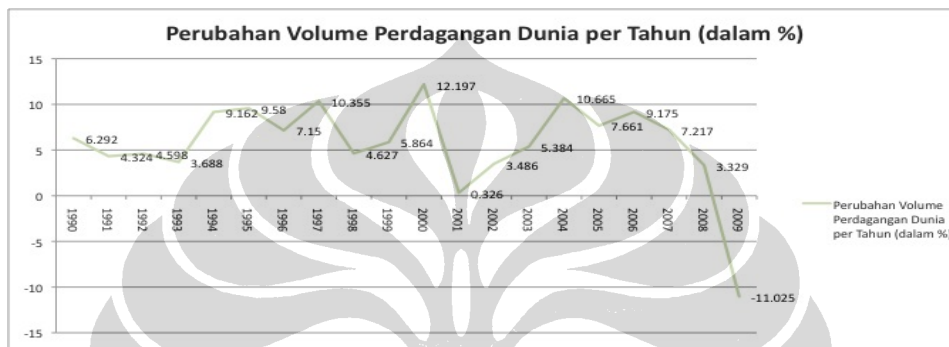
Sistem perekonomian internasional yang dipengaruhi oleh konsep perdagangan bebas, telah menghubungkan banyak negara, baik maju maupun berkembang dalam satu skema besar. Keterkaitan antar perekonomian Negara-negara semakin erat seiring dengan meningkatnya pergerakan arus barang, jasa dan modal. Kehadiran aktor-aktor baru dalam perekonomian dunia seperti perusahaan multinasional serta lembaga-lembaga non-pemerintah pun mengiringi perkembangan ekonomi global. Keterkaitan tersebut, yang sebelumnya diharapkan dapat mengembangkan perekonomian Negara-negara secara keseluruhan, berpotensi untuk menjadi katalisator bagi penyebaran krisis yang mewarnai perjalanan ekonomi global.

## **IV.2 Konstelasi Perekonomian Global dan Episode Krisis**

Pasang surut perkembangan ekonomi global yang dipengaruhi oleh pemikiran kapitalisme berbentuk sistem perdagangan bebas, seperti yang diungkapkan oleh Schumpeter dalam teori siklus bisnis bahwa sistem kapitalisme selalu diiringi oleh periode *boom* dan *bust*, juga terjadi dalam sejarah ekonomi global. Berdasarkan data yang dihimpun oleh IMF (*International Monetary Fund*) yang terlihat pada grafik 4.1 dan

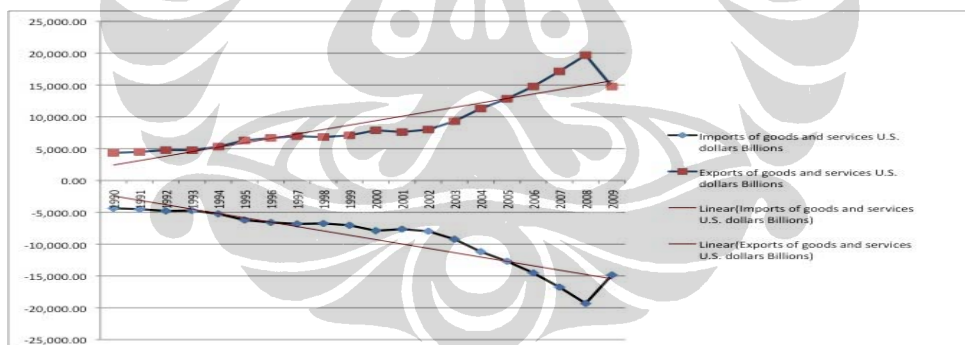
4.2, pada abad ke 20 hingga abad ke 21 awal, volume perdagangan antar Negara meningkat. Intensitas hubungan antar perekonomian pun semakin berkembang, namun pada kurun waktu yang sama, perekonomian global sudah mengalami beberapa peristiwa krisis ekonomi yang mempengaruhi tidak hanya satu atau dua negara saja, namun hampir seluruh Negara-negara di dunia.

**Grafik 4.1**  
**Perubahan Volume Perdagangan Dunia dari Tahun ke Tahun (dalam %)**



Sumber: World Economy Outlook 2009, IMF

**Grafik 4.2**  
**Volume Impor dan Ekspor Barang dan Jasa Global (dalam miliar Dollar AS)**



Sumber: World Economy Outlook 2009, IMF

Beberapa krisis yang terjadi dalam periode tersebut adalah krisis minyak dunia pada tahun 1970-an yang disebabkan oleh kenaikan salah satu bahan bakar utama, yaitu minyak bumi sehingga mengganggu kinerja perekonomian dan industri; krisis hutang kawasan Amerika Latin pada tahun 1980-an yang dialami oleh beberapa negara kawasan Amerika Selatan sehingga menyebabkan berbagai negara tersebut mengalami gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman luar negeri; krisis finansial Asia 1997 yang menghancurkan perekonomian Negara-negara *emerging economies* yang sebelum terjadinya krisis ini diharapkan dapat menjadi salah satu

mesin utama penggerak perekonomian global, namun lantaran gangguan moneter yang hebat yang pada akhirnya menjelma menjadi krisis keuangan secara utuh; dan episode krisis terbaru, yaitu krisis finansial global 2008 yang berawal dari Amerika Serikat yang notabene adalah negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Pada sub bab ini akan membahas mengenai bagaimana krisis perekonomian yang berawal dari permasalahan domestik ekonomi merebak menjadi krisis global yang menjangkiti Negara-negara lain, terutama melalui jalur finansial dengan ilustrasi komparatif antara krisis-krisis yang terjadi sebelumnya dengan krisis global yang terjadi baru-baru ini.

Aliran dana asing memang memberikan keuntungan tersendiri bagi Negara-negara yang menjadi tujuan investasi, terutama bagi Negara-negara berkembang yang sedang berusaha untuk menaikan sektor-sektor perekonomiannya. Aliran modal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdampak pada ketersediaan penambahan sumber dana bagi industri-industri di suatu negara untuk melakukan pengembangan yang pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita nasional, serta mengundang investor-investor lain untuk ikut menanamkan modalnya. Sehingga, secara hitungan makro, masuknya modal asing berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan, meningkatkan produksi, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di tatanan perekonomian global seperti saat ini, keterkaitan antar negara yang mendorong pergerakan barang, jasa dan modal secara bebas diharapkan dapat memperkecil jurang perbedaan antara negara miskin dan negara kaya, antara negara berkembang dan negara maju. Setiap negara yang tergabung dalam tatanan ini memiliki akses terhadap aliran modal asing yang dapat dipergunakan untuk memajukan sektor perekonomian ril Negara tersebut, meningkatkan devisa dengan diberikannya akses pemasaran produk ke Negara-negara lain, dan terciptanya suasana kompetisi yang sehat dan dinamis, dimana Negara-negara tersebut akan berpacu dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam negeri. Gambaran positif mengenai sistem perekonomian internasional yang bebas seperti sekarang ini tidak selamanya sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sistem ini juga memiliki kekurangan yang dapat melemahkan posisi negara dalam menghadapi ancaman permasalahan ekonomi eksternal.

Struktur ekonomi internasional, yang menciptakan hubungan keterikatan (interkoneksi) antara Negara-negara penganut sistem pasar terbuka dalam struktur tersebut, tidak hanya memudahkan proses distribusi barang dan modal, namun juga mempermudah penyebaran krisis dan hal tersebut membuat dampak krisis semakin besar. Berdasarkan database yang dimiliki oleh IMF, ada 182 negara yang tergabung dalam struktur perdagangan internasional yang terbaru. Ini mengindikasikan bahwa apabila salah satu anggota mengalami krisis ekonomi yang cukup hebat, maka ada sekitar 180 negara lainnya yang berpotensi untuk terkena dampak dari krisis tersebut baik secara langsung maupun hubungan tidak langsung. Terlebih lagi apabila krisis tersebut memiliki daya goncang yang hebat dan terjadi pada Negara yang mempunyai banyak mitra dagang langsung.

Beberapa episode krisis finansial yang terjadi memperkuat persepsi tersebut. *Tequilla Crisis*<sup>5</sup> pada tahun 1994, Krisis Hutang pada tahun 1982 yang diawali oleh pengumuman akan ketidakmampuan pemerintah Mexico untuk membayar hutang-hutang luar negeri sehingga mengakibatkan beberapa perekonomian Amerika Selatan mengalami masalah dan kemudian Krisis Finansial Asia pada tahun 1997 yang menyebabkan hancurnya perekonomian Negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

Memang benar bahwa salah satu faktor penting dalam krisis-krisis tersebut adalah kesamaan struktur fundamental perekonomian Negara-negara yang terjebak dalam krisis tersebut dan kedekatan lokasi geografis dari negara yang menjadi pencetus dengan Negara-negara lain yang terkena imbas, namun tidak dapat dipungkiri bahwa jalur perdagangan dan jalur finansial yang terbuka menjadi faktor penyebaran krisis.<sup>6</sup> Terbukanya jalur perdagangan dan jalur finansial pada suatu negara, memudahkan terjadinya penyebaran resesi ekonomi ke negara lain sehingga menimbulkan krisis.

Perwujudan dari penyebaran krisis itu sendiri bermacam-macam dan sangat tergantung dengan keadaan perekonomian domestik negara yang “terjangkiti”. Sebagai ilustrasi penyebaran krisis melalui jalur perdagangan adalah bilamana partner dagang dari sebuah negara mengalami permasalahan besar dalam perekonomiannya yang

---

<sup>5</sup> *Tequilla Crisis* adalah krisis finansial yang berawal dari devaluasi mata uang peso secara besar-besaran dan *Tequilla Effect* terminology yang digunakan untuk menggambarkan penyebaran efek permasalahan ekonomi yang dialami oleh Mexico pada tahun 1994 ke Negara-negara Amerika Latin lainnya.

<sup>6</sup> Diperoleh dari <http://www1.worldbank.org>, [diakses pada 20 Maret 2009].

mengakibatkan negara tersebut mengurangi permintaan terhadap impor, maka akan mengganggu akumulasi devisa negara pengekspor. Apabila negara pengekspor tidak dapat menemukan pengganti “pasar yang hilang”, maka negara tersebut akan menghadapi penurunan devisa dan barang yang *oversupply*. Keadaan tersebut bisa berakibat pada penurunan kemampuan negara untuk membayar hutangnya; menjalankan program-programnya; mengeluarkan stimulus fiskal untuk menggerakkan roda perekonomian; menjaga nilai tukar mata uangnya untuk mempertahankan kompetitif barang-barang ekspor dan menghindari kenaikan jumlah hutang luar negeri yang harus dibayar; sementara, *oversupply* dari barang-barang ekspor Negara tersebut, apabila berada dalam jumlah yang sangat banyak dapat menyebabkan deflasi, yang kemudian akan memunculkan permasalahan ekonomi dan kesejahteraan seperti: meningkatnya jumlah pengangguran akibat ketidakmampuan produsen untuk menjual hasil-hasil produksinya, turunnya tingkat konsumsi dan perlambatan ekonomi secara keseluruhan.

Melihat keterkaitan (interkoneksi) seperti yang sudah dijabarkan, bayangkan apabila penurunan konsumsi impor menurun dengan sangat drastis akibat permasalahan ekonomi di suatu Negara, maka dampaknya ke Negara-negara lain pun akan sangat besar. Permasalahan ekonomi yang awalnya hanya menghinggapi satu negara saja, dapat berkembang dan “menginfeksi” dua atau tiga negara hingga berkembang menjadi permasalahan regional atau bahkan internasional, melalui jalur perdagangan. Rangkaian peristiwa tersebut menjalar dari satu negara ke negara lainnya hingga akhirnya krisis tersebut mereda akibat adanya perubahan kebijakan, ekspektasi, ataupun faktor-faktor politik domestik.

Adapun penyebaran krisis melalui jalur finansial dapat terjadi melalui masuknya modal asing baik dalam bentuk pinjaman atau investasi, terutama investasi jangka pendek (pembelian saham, obligasi, deposito *short term* dan lainnya). Aliran modal asing yang masuk ke dalam suatu perekonomian tentunya dapat membantu industri-industri di berbagai sektor untuk tumbuh, namun, dampak negatifnya pun cukup signifikan. Sebagai ilustrasi penyebaran krisis melalui jalur finansial dengan menjadikan pinjaman luar negeri sebagai medium penghantarnya adalah sebagai berikut: Aksi pinjam meminjam antar Negara yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak

swasta kepada institusi pemerintah maupun institusi swasta Negara lain dalam bentuk kredit (*loan*) atau surat hutang, kerap dilakukan oleh para kreditor untuk memanfaatkan *interest rate gap* dan kurs mata uang asing. Dalam perjalanannya, ketika para kreditor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran cicilan hutangnya akibat satu dan lain hal, maka yang akan terjadi adalah pihak debitor pun akan mengalami gangguan likuiditas internal dan membangkitkan persepsi buruk terhadap kreditor-kreditor lain yang berasal dari Negara tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya adalah para debitor enggan memberikan tambahan pinjaman atau mekanisme restrukturisasi hutang akibat risiko yang dinilai terlalu tinggi. Tidak berhenti sampai disitu, pihak-pihak kreditor lain pun yang sebenarnya tidak bermasalah dapat berubah menjadi bermasalah akibat menurunnya likuiditas dalam negeri dan hilangnya kepercayaan debitor. Menurunnya kepercayaan dari para debitor memicu rasa ketidakpercayaan dari investor-investor lain, sehingga menyebabkan para investor-investor besar mulai menghentikan dan menarik aliran dananya dari Negara tersebut. Tentunya, hal tersebut berpotensi menghasilkan tingkat *capital outflow* yang besar. Grafik 4.3 menggambarkan betapa besarnya pergerakan arus modal keluar yang dialami oleh Negara-negara kawasan Asia Tenggara pada krisis Finansial Asia tahun 1997 setelah pada 10 tahun sebelum terjadinya krisis tersebut, Negara-negara Asia Tenggara menikmati derasnya arus modal asing yang masuk, terutama yang berbentuk dana segar dan investasi *portfolio*.

**Grafik 4.3**  
**Pergerakan Arus Modal di Negara-negara Asia yang Terkena Krisis Finansial Asia tahun 1997 dalam miliar Dollar AS**



Sumber: World Economy Outlook, 2000



Penarikan modal tersebut kemudian akan menekan nilai tukar mata uang yang dapat, mata uang dalam negeri akan mengalami depresiasi dan menyebabkan tekanan pada pemerintah beserta bank sentral untuk memenuhi permintaan akan mata uang asing. Pada gilirannya hal ini dapat menggiring pada bertambahnya jumlah kreditor yang gagal bayar akibat nilai nominal pinjaman yang tiba-tiba membengkak karena diberikan dalam bentuk mata uang asing. Kenaikan nilai mata uang asing juga berdampak pada kenaikan harga barang-barang impor di negara tersebut. Oleh karenanya, aksi ini dapat diikuti dengan kenaikan tingkat inflasi yang mengancam kesejahteraan penduduk negara tersebut. Kekhawatiran para investor akan menyebarnya permasalahan tersebut ke Negara-negara lain yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara yang “bermasalah”, memicu penarikan dana secara tiba-tiba dari Negara-negara lain yang biasanya berada dalam satu kawasan, sehingga menimbulkan permasalahan baru di negara lain dan begitu seterusnya hingga kepercayaan dapat dipulihkan dan kebijakan ekonomi yang dapat memulihkan keadaan diterapkan.

Penyebaran krisis melalui jalur perdagangan maupun jalur finansial sulit untuk dibedakan. Karena, pada umumnya penyebaran melalui kedua jalur tersebut saling berhubungan. Sebagai contoh sebelum krisis finansial yang merebak di kawasan Asia pada tahun 1997, dimana pada saat itu mata uang Negara-negara di Asia Tenggara mengalami apresiasi yang menyebabkan tidak kompetitifnya komoditas ekspor dari Negara-negara tersebut apabila dibandingkan dengan hasil produksi Negara-negara lain, khususnya China. Sehingga, volume ekspor yang dijadikan mesin utama pertumbuhan ekonomi kawasan dan penarik modal asing pun menurun. Penurunan angka ekspor tidak serta merta langsung menyebabkan krisis, namun hal tersebut menyebabkan, para investor mempertanyakan kondisi perekonomian sebenarnya dari Negara-negara tersebut. Situasi ini didukung pula dengan pelemahan ekonomi Jepang yang menjadi salah satu tujuan ekspor Negara-negara kawasan Asia Tenggara dan pemimpin dalam struktur “angsa terbang”<sup>7</sup>. Lebih lanjut, pelemahan sektor riil Negara-

---

<sup>7</sup> Istilah “*The Flying Geese*” sering digunakan untuk menggambarkan tatanan perekonomian kawasan Asia yang pada era 90-an sedang menanjak. Dalam tatanan tersebut, Jepang, sebagai Negara maju, diposisikan menjadi pemimpin kawasan dalam menumbuhkembangkan perekonomian dengan mengadaptasi sistem pasar terbuka. Sebagai pemimpin, Jepang memberikan akses pasar domestiknya bagi produk-produk ekspor Negara-negara lain, sehingga memacu Negara-negara tersebut untuk menggiatkan produksi dalam negeri yang kemudian diharapkan dapat berimbas pada perbaikan ekonomi dan kesejahteraan.

negara tersebut semakin diperburuk dengan aksi para spekulasi yang melakukan spekulasi terhadap mata uang domestik dan mengakibatkan nilai tukar mata uang domestik mengalami tekanan yang sangat hebat. Kondisi sektor finansial pun ternyata tidak sebaik yang tampak dipermukaan. Berdasarkan grafik 4.3, aliran modal masuk secara keseluruhan mengalami kenaikan yang sangat signifikan terutama pada tahun 1993-1994, akan tetapi, apabila dilihat dengan lebih seksama, porsi modal asing jangka pendek jauh lebih banyak dibandingkan dengan porsi modal asing jangka panjang yang dilambungkan dengan *direct investment*. Konsekuensinya adalah, apabila terjadi penarikan besar-besaran terhadap arus modal asing jangka pendek yang sangat sensitif terhadap isu-isu ekonomi, akan menyebabkan gangguan finansial yang hebat dan itulah yang terjadi pada Negara-negara kawasan Asia Tenggara pada tahun 1997.

Ketika Pemerintah Thailand mengumumkan bahwa nilai tukar Baht tidak lagi menerapkan sistem *pegging*<sup>8</sup>, kekhawatiran akan kejatuhan ekonomi Thailand yang mungkin akan segera diikuti dengan Negara-negara lainnya, memicu para spekulasi untuk berspekulasi terhadap mata uang regional dan mendorong para investor untuk menarik dananya guna menghindari kerugian. Akibatnya adalah krisis tersebut berkembang hingga merontokkan perekonomian kawasan. Tidak berhenti hanya pada kawasan Asia Tenggara saja, dampak dari runtuhnya perekonomian Negara-negara tersebut memicu resesi dunia akibat pengurangan kebutuhan impor dari Negara-negara yang sedang berada dalam krisis tersebut, yang berarti menyebarkan krisis melalui jalur perdagangan. Di segi finansial, krisis Asia mengakibatkan menumpuknya hutang luar negeri dan gangguan likuiditas akibat merebaknya fenomena kredit macet di kalangan kreditor yang berasal dari Negara-negara krisis. Sehingga, efek krisis menjalar dari satu Negara ke Negara lainnya.

Lantas, bagaimana dengan krisis global 2008 yang dipicu oleh krisis *Subprime Mortgage* di Amerika Serikat? Apakah krisis tersebut menyebar juga melalui jalur perdagangan dan jalur finansial? Iya, penjelasan pada bab II mengenai bagaimana krisis *Subprime* mempengaruhi Negara-negara di dunia, menjabarkan penyebaran krisis melalui kedua jalur tersebut. Perbedaan krisis *Subprime* dengan Krisis Hutang Amerika Latin tahun 1982, *Tequilla Crisis* tahun 1994, dan Krisis Finansial Asia tahun 1997

adalah krisis kali ini memiliki dampak langsung yang lebih luas karena episentrum dari krisis tersebut adalah Amerika Serikat yang tidak lain adalah lokomotif dari perdagangan internasional yang juga merupakan Negara dengan perekonomian terbesar di dunia saat ini dan tujuan ekspor utama berbagai anggota struktur perdagangan internasional, termasuk China. Lebih lanjut, jangkauan investor-investor Amerika Serikat ke berbagai negara juga menyebabkan krisis kali ini lebih luas dampaknya. Jadi, tidak lagi terkait hanya pada satu atau dua kawasan saja, melainkan mempengaruhi seluruh mitra dagang dan tujuan investasi Amerika Serikat di berbagai kawasan. Tabel 4.1 menampilkan mitra dagang (ekspor) beberapa Negara-negara yang kerap disebut-sebut sebagai *emerging economy*. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara-negara tersebut menempatkan Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa sebagai tujuan ekspor utama, otomatis mitra-mitra dagang lain yang mungkin tidak menjadikan Amerika Serikat, maupun Eropa sebagai tujuan utama, tetap terkena imbas akibat hubungan dagangnya dengan *emerging economy* tersebut.

**Tabel 4.1**  
**Mitra Dagang Utama Beberapa *Emerging Economies***

<b>Negara</b>	<b>Mitra Dagang (Ekspor)</b>	<b>Pangsa Kumulatif (%)</b>	<b>Jumlah Negara Mitra Dagang</b>
Malaysia	AS, Singapura, Jepang, China dan Thailand	53,11	5
China	AS, Hongkong, Jepang, Korea dan Jerman	51,27	5
Korea	China, AS, Jepang, Hongkong, Singapura dan Jerman	52,27	6
Singapura	Malaysia, China, AS, Australia, Korea, India, Negara Asia lainnya dan Belanda	51,88	8
India	AS, Uni Emirat Arab, China, Singapura, Inggris, Hongkong, Jerman, Belgia dan Italia	51,5	9
Brazil	AS, Argentina, China, Belanda, Jerman, Italia, Jepang, Chili dan Meksiko	52,2	9
Thailand	AS, Jepang, China, Singapura, Hongkong dan Malaysia	51,11	6

Sumber: *Indonesia Economy Outlook 2009*

**Tabel 4.2**  
**Prosentase Ekspor Komoditi Negara-negara Berkembang ke Amerika Serikat**  
**(dalam %)**

Negara	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	rata-rata
Indonesia	42,6	43,3	45,4	47,7	44,1	52,9	55,3	57,1	49,9	48,7
Brazil	39,8	43,8	45,4	46,8	45,4	45,6	47,9	50,1	46,5	45,7
China	11,6	11,2	9,9	9,2	8,4	7,9	7,3	6,6	8,1	8,9
Malaysia	18,8	18,9	19,2	22,2	23,1	23,9	24,8	27,5	23	22,4
Vietnam	54,1	52,3	49,5	46,4	47,3	49,7	48,4	n.a	49,2	49,6

Sumber: *Indonesia Economy Outlook 2009*

Berbeda dengan krisis-krisis lainnya yang menyerang perekonomian Negara-negara berkembang, krisis kali ini, sejatinya menyerang Negara-negara maju dan para perusahaan transnasionalnya terlebih dahulu. Krisis *Subprime Mortgage* yang membesar menjadi krisis finansial global, sangat mempengaruhi kondisi finansial Negara-negara maju dan juga perusahaan-perusahaan transnasional yang selama ini menjadi sumber modal asing bagi Negara-negara berkembang maupun Negara-negara miskin. Dampak krisis terhadap perekonomian Negara-negara maju sangat terlihat pada kelompok-kelompok negara yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor finansial Amerika Serikat, seperti Inggris, Perancis, dan Swiss. Pelemahan ekonomi Negara-negara maju secara otomatis berimbas langsung kepada volume ekspor negara berkembang atau negara industri baru di berbagai kawasan. Kelompok Negara berkembang dan Negara industri baru, selama ini cukup menikmati hasil dari hubungan perdagangan terbuka dengan Negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris. Data-data pada tabel 4.3 menunjukkan seberapa signifikan konsumsi Amerika Serikat terhadap hasil produksi Negara-negara berkembang.

Walaupun komposisi portfolio investasi asing di kelompok Negara berkembang tidak berhubungan langsung dengan *Subprime Mortgage*, namun dampak yang dirasakan tidak kalah serius dengan yang dirasakan oleh Negara-negara maju yang lebih jelas keterkaitannya. Pengeluaran instrumen-instrumen sekuritisasi di kelompok negara berkembang menjadi terhenti, pinjaman luar negeri yang berasal dari bank menjadi sangat terbatas dengan bunga yang tinggi, *spread* surat obligasi melonjak tinggi, harga-harga ekuitas menurun, dan pasar uang menghadapi tekanan besar.

Bersamaan dengan gangguan arus dana masuk (*capital inflow*), nilai tukar mata uang Negara-negara berkembang juga mengalami tekanan depresiasi akibat tingginya permintaan dollar Amerika oleh para investor yang memilih untuk memegang “aset aman” yaitu dollar, serta tingginya arus *capital outflow* yang memaksa pemerintah Negara-negara berkembang untuk menggunakan devisanya demi mempertahankan nilai tukar mata uang Negara tersebut. Kelompok ekonomi berkembang, khususnya yang menggantungkan diri terhadap pemodal asing, mendapatkan respon negatif dari para investor karena kekhawatiran mereka akan stagnasi ekonomi. Di samping itu, faktor-faktor endogenus Negara-negara berkembang, seperti: lemahnya sistem manajemen risiko, ketimpangan yang terjadi pada *balance sheet*, dan pertumbuhan cepat nilai kredit bank juga turut melemahkan posisi Negara-negara berkembang pada masa krisis ini. Akibatnya adalah kondisi cadangan devisa mengalami penurunan cukup tajam yang pada gilirannya akan meningkatkan risiko terjadinya gagal bayar dari segi pemerintah Negara-negara tersebut. Beberapa negara kawasan Asia dan Afrika pada akhirnya terpaksa berpaling kepada IMF untuk bantuan finansial. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan dan Pakistan.<sup>9</sup>

Dampak krisis yang menyebar melalui jalur perdagangan ke Negara-negara berkembang, walaupun lebih merupakan dampak kelanjutan (*contagion effect*) dari krisis *Subprime Mortgage*, karena tidak semua Negara-negara kawasan tersebut yang memiliki hubungan secara langsung dengan aset-aset yang berbasis *mortgage*, namun dampaknya nyata dan dapat mengganggu kinerja perekonomian ril.

---

<sup>9</sup> *ibid*, hlm 53.

**Diagram 4.1**  
**Penyebaran Krisis Subprime Mortgage Terhadap Perekonomian Domestik Negara-negara Lain Melalui Jalur Perdagangan dan Jalur Finansial**



Sumber: *Indonesia Economy Outlook, 2009*

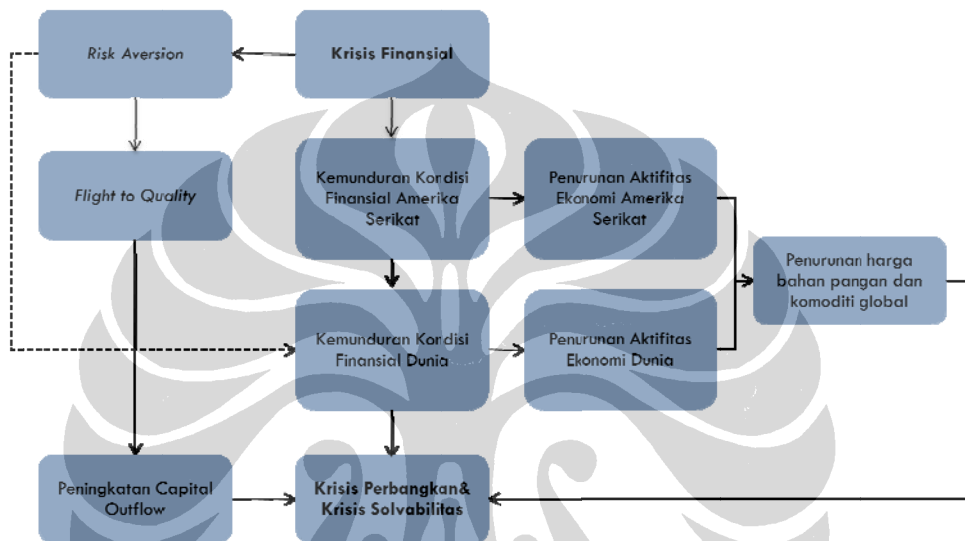
Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah tujuan utama ekspor Negara-negara berkembang. Meskipun bagi Negara-negara tertentu Amerika Serikat maupun Uni Eropa bukan merupakan mitra dagang utama, namun perlambatan ekonomi Amerika Serikat akan menyebabkan dampak rambatan ke Negara-negara lain yang merupakan mitra dagang utama Negara tersebut, sehingga perekonomian Negara tersebut tetap akan terpengaruh.

Di samping itu, Negara-negara berkembang yang masih menjadikan ekspor komoditas sebagai salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan Negara, juga akan terkena dampak dari pelemahan ekonomi Amerika Serikat seiring dengan anjloknya harga komoditas akibat menurunnya permintaan secara global. Pada tabel 4.2 terlihat penurunan ekspor komoditas di tahun 2008 dari beberapa *emerging economies* setelah pada tahun 2005-2007 Negara-negara tersebut mengalami peningkatan.

Pelemahan ekonomi Negara-negara pengeksport terus terjadi dan semakin menekan laju pertumbuhan PDB dunia, setelah pada tahun-tahun sebelumnya kelompok Negara-negara berkembang mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan membantu peningkatan PDB global.

Diagram 4.2

**SKEMA PENYEBARAN KRISIS SUBPRIME MORTGAGE TERHADAP PEREKONOMIAN GLOBAL**



Sumber: Indonesian Economy Outlook, 2009

Negara-negara Eropa, seperti Inggris, Perancis, Jerman yang selama ini menjadi mitra ekonomi baik di segi pertukaran barang dan jasa maupun transaksi finansial tidak luput dari ancaman krisis yang merongrong perekonomian domestik mereka. Hubungan lintas Negara para aktor-aktor non pemerintah pun sangat erat terjalin. Perusahaan-perusahaan Transnansional yang sebelumnya diharapkan untuk dapat memberikan tambahan modal kepada Negara-negara berembang, kini justru berperan dalam menyebarkan krisis, terutama pada Negara-negara berkembang di Eropa. Sehingga, tidak mengherankan ketika krisis *Subprime* merebak di Amerika Serikat Negara-negara maju Eropa beserta perusahaan-perusahaan multiansionalnya menjadi korban pertama.

**IV.3 Dampak Krisis Oktober 2008 Terhadap Kelompok Negara-negara Eropa**

Pada 9 Agustus 2007, BNP Paribas Perancis mengumumkan bahwa bank tersebut tidak lagi menyanggupi pencairan sekuritas yang terkait dengan *Subprime*

*Mortgage* di Amerika Serikat.<sup>10</sup> Pengumuman tersebut diikuti dengan pengungkapan kerugian bank-bank atau lembaga-lembaga finansial besar lainnya seperti: Citibank, HSBC, UBS. Hal tersebut memicu krisis kepercayaan di pasar uang global. Kesulitan untuk memilah-milah bank atau institusi mana yang memiliki aset yang terkait dengan *subprime mortgage* mendorong munculnya perilaku menghindari risiko (*risk aversion*) yang berlebihan dari para pelaku pasar, terutama di Amerika Serikat dan di Eropa karena keterkaitan hubungan finansial yang erat antara kedua pusat ekonomi ini.<sup>11</sup> Kondisi ini dengan cepat menciptakan kekeringan likuiditas yang sangat parah di pasar global dan memaksa bank sentral Uni Eropa ECB untuk bertindak cepat dengan menyuntikan likuiditas ke pasar sebesar 95 miliar Euro pada Agustus 2007 guna menenangkan kondisi pasar.

Selanjutnya, bank-bank sentral di Negara-negara maju mengambil kebijakan untuk menurunkan bunga agar dapat meredam gejolak pasar keuangan. Akan tetapi kebijakan-kebijakan tersebut sepertinya tidak dapat menghentikan eksekusi dari krisis ini. Pada pertengahan kuartal 2008, laju pertumbuhan ekonomi dunia mulai melemah, sekalipun pertumbuhan ekonomi di Negara-negara berkembang masih tetap menunjukkan tanda-tanda yang positif. Penyebaran krisis ke perekonomian lain terus berlanjut. Selain negara maju, Negara-negara lainnya mulai merasakan imbasnya dan penyebaran tersebut terjadi dalam waktu yang cepat seiring dengan meningkatnya intensitas krisis yang dipicu oleh pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers. Dampak krisis *Subprime Mortgage* bagaikan air deras yang mengalir dari keran yang terbuka, menjalar ke berbagai Negara dalam sekejap. Aksi *flight to quality* yang dilakukan oleh para pelaku pasar semakin marak sehingga memicu *capital outflow* yang menyebabkan melemahnya nilai tukar dan semakin tertekannya kondisi pasar modal. Melihat kondisi ini, pemerintah Negara Negara Eropa mengumumkan paket penyelamatan perbankan miliaran dollar. Pemerintah Inggris mengeluarkan dana sebesar 50 miliar poundsterling setelah sebelumnya BoE menyuntikan dana sebesar 10 miliar poundsterling untuk menjaga likuiditas akibat penarikan uang secara besar-besaran (*bank run*)<sup>12</sup>, diikuti oleh pemerintah Jerman yang menyiapkan dana sebesar 50 miliar euro untuk

---

<sup>10</sup> BBC *timeline Global Credit Crunch*

<sup>11</sup> *Indonesia Economic Outlook*. hlm. 59.

<sup>12</sup> *Indonesian Economic Outlook*. hlm 45.



menyelamatkan *Hypo Real Estate Bank*.<sup>13</sup> Lebih lanjut 5 bank sentral di kawasan Eropa, ECB, BoE, BoC, Swedia dan Swiss, bersama-sama menurunkan suku bunga sebesar 5% untuk melonggarkan likuiditas.

Aktivitas ekonomi di sebagian besar Negara-negara maju di Eropa mulai mengalami kontraksi sebelum kebangkrutan Lehman Brothers pada September 2008. Penyebab utama hal tersebut adalah kenaikan harga minyak. Pada awalnya, banyak pihak yang mengasumsikan bahwa perekonomian Eropa tidak akan mengalami resesi yang demikian parah.<sup>14</sup> Akan tetapi, kekacauan di sektor finansial yang ternyata lebih buruk dibandingkan dengan ekspektasi awal. Kekhawatiran akan menggelembungnya kerugian bank-bank besar Eropa akibat aset sekuritas yang berbasis *mortgage* Amerika Serikat, menyebabkan pasar grosir berhenti pada bulan September 2008 dan memaksa pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap bank. Permasalahan yang tadinya hanya dialami oleh beberapa bank saja dengan penyebab yang bervariasi dengan cepat berubah menjadi ancaman serius karena adanya keterkaitan yang sangat erat antar institusi finansial besar<sup>15</sup>. Perkiraan bahwa implikasi makroekonomi dari kekacauan di sektor finansial terhadap perekonomian riil akan terbatas, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Keterbatasan arus permodalan dengan cepat merubah krisis sektor finansial menjadi krisis di sektor riil pada kuartal keempat 2008.

Kurangnya koordinasi dan bentuk-bentuk kebijakan yang diambil oleh Negara-negara maju di Eropa menyebabkan langkah penghentian krisis tidak terlalu efektif. Harga-harga saham terus menurun, investasi bisnis juga mengalami penurunan, dan investasi di sektor perumahan ikut mengalami kejatuhan terutama di Negara-negara yang mengalami gelembung sektor properti, seperti Inggris. Walaupun harga minyak mengalami penurunan pada akhir tahun 2008, namun tetap saja tidak bisa menghentikan laju penurunan konsumsi. Akibatnya, sebagian besar Negara-negara maju di Eropa mengalami pelemahan ekonomi sejak pertengahan 2008. Pada tabel 4.3, pertumbuhan PDB yang sering digunakan sebagai indikator utama pergerakan ekonomi suatu Negara menunjukkan bahwa Negara-negara maju di Eropa mengalami penurunan

---

<sup>13</sup> *ibid*, hlm, 46.

<sup>14</sup> IMF *World Economy Outlook*, April 2009. hlm 96.

<sup>15</sup> Kurang lebih 16 pelaku inti sektor finansial Eropa menguasai sepertiga dari total aset perbankan di Uni Eropa dan memegang 38% dari aset perbankan Uni Eropa mereka di luar Negeri (Trichet 2007).

sekitar 6% pada tahun 2008 dan akan mengalami penurunan kembali sebesar 4% di tahun 2009. Kondisi ini lebih buruk dibandingkan peristiwa resesi ekonomi yang melanda kawasan tersebut pasca perang dunia II.

Sebagian Negara-negara maju Eropa mengambil langkah untuk melonggarkan kebijakan moneter dengan menurunkan tingkat suku bunga. Kemudian dari segi kebijakan fiskal, pemerintah Negara-negara tersebut menyetujui paket stimulus perekonomian dengan menyuntikan sejumlah modal guna memperlancar pergerakan pendanaan. Langkah memperkuat belanja negara juga dilakukan di beberapa Negara, seperti: Jerman, Finlandia dan Siprus yang memiliki cadangan devisa cukup kuat atau bahkan surplus. Namun bagi Negara-negara seperti Belgia, Irlandia, dan Portugal yang mengalami defisit neraca dan hutang publik yang tinggi, stimulus fiskal dan kelonggaran anggaran belanja Negara sangat terbatas.

Dampak resesi terparah diperkirakan akan terjadi di Irlandia, akibat periode *boom* sektor konstruksi yang menjadi hancur setelah krisis merebak, di Islandia, akibat kolapsnya struktur finansial negara tersebut yang sebelum krisis sudah menggelembung, dan di Inggris, akibat kejatuhan sektor properti serta terhambatnya aktivitas finansial di negara tersebut. Penyebaran krisis yang semula menghantam perekonomian Negara-negara maju di Eropa, mulai mengancam perekonomian kelompok Negara-negara berkembang di kawasan tersebut. Aktivitas ekonomi mengalami penurunan yang signifikan akibat ketergantungan berbagai negara tersebut kepada aliran modal asing, yang sebagian besar berasal dari Negara-negara maju, untuk mendanai periode *boom* kredit di kalangan Negara berkembang.

Pada awal mula krisis merebak, Negara-negara berkembang Eropa, seperti Lithuania, Estonia, Latvia, Italia masih berada dalam posisi yang cukup baik. Akan tetapi, penurunan konsumsi di kalangan Negara-negara maju Eropa dan aksi penarikan dana oleh para investor yang lebih memilih untuk menanamkan modal di pasar yang lebih stabil, mengakibatkan perubahan drastis kondisi ekonomi Negara-negara berkembang pada kuartal ketiga 2008. Beberapa Negara berkembang kawasan Eropa, seperti: Latvia, Serbia, Rumania Polandia dan Turki meminta bantuan kepada IMF untuk menjaga kondisi neraca pembayaran atau akses kredit yang fleksibel.

**Tabel 4.3**  
**Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Negara-negara Maju di Eropa Tahun 2007-2010**

	Real GDP			
	2007	2008	2009	2010
<b>Advanced economies</b>	2,7	0,9	-3,8	0,0
Amerika Serikat	2,0	1,1	-2,8	0,0
Area Eropa	2,7	0,9	-4,2	-0,4
Jerman	2,5	1,3	-5,6	-1,0
Italia	2,1	0,7	-3,0	0,4
Spanyol	1,6	-1,0	-4,4	-0,4
Belanda	3,7	1,2	-3,0	0,4
Belgia	2,6	1,1	-3,8	0,3
Yunani	4,0	2,9	-0,2	-0,6
Austria	3,1	1,8	-3,0	0,2
Portugal	1,9	0,0	-4,1	-0,5
Finlandia	4,2	0,9	-5,2	-1,2
Irlandia	6,0	-2,3	-8,0	-3,0
Republik Slovakia	10,4	6,4	-2,1	1,9
Slovenia	6,8	3,5	-2,7	1,4
Luxembourg	5,2	0,7	-4,8	-0,2
Cyprus	4,4	3,7	0,3	2,1
Malta	3,6	1,6	-1,5	1,1
Jepang	2,4	-0,6	-6,2	0,5
Inggris	3,0	0,7	-4,1	-0,4
Canada	2,7	0,5	-2,5	1,2

Sumber: IMF, *World Economy Outlook 2009*

**Tabel 4.4**  
**Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Negara-negara Berkembang di Eropa Tahun 2007-2010**

	Real GDP			
	2007	2008	2009	2010
<b>Emerging Europe</b>	5,4	2,9	-3,7	0,8
Turki	4,7	1,1	-5,1	1,5
<i>Excluding Turkey</i>	5,9	4,1	-2,9	0,3
<b>Baltics</b>	8,7	-0,7	-10,6	-2,3
Estonia	6,3	-3,6	-10,6	-1,0
Latvia	10,0	-4,6	12,0	-2,0

Lithuania	8,9	3,0	-10,0	-3,0
<b>Eropa Tengah</b>	5,4	3,8	-1,3	0,9
Hungaria	1,1	0,6	-3,3	-0,4
Poland	6,7	4,8	-0,7	1,3
<b>Eropa Timur</b>	6,1	6,1	-3,6	-0,2
Bulgaria	6,2	6,0	-2,0	-1,0
Kroasia	5,5	2,4	-3,5	0,3
Rumania	6,2	7,1	-4,1	0,0

Sumber: IMF, *World Economy Outlook 2009*

Pada masa pra krisis 2008, Negara-negara berkembang Eropa mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu rata-rata 5-7%, bahkan Latvia mampu mencapai angka 2 digit dalam pertumbuhan ekonominya, yaitu 10%. Pertumbuhan yang begitu tinggi memang rawan menjadi gelembung atau *overheating*. Terlebih lagi, jika pertumbuhan yang tinggi dimodali oleh modal asing jangka pendek, seperti yang terjadi di kebanyakan Negara berkembang kawasan Eropa. Kombinasi antara modal asing jangka pendek dan gelembung ekonomi semakin diperburuk dengan kondisi dimana sebagian institusi finansial yang beroperasi di Negara-negara tersebut dimiliki oleh perusahaan-perusahaan transnasional yang bermasalah, sehingga memperkecil kemungkinan restrukturisasi hutang jangka pendek Negara-negara berkembang.

Beberapa bank sentral Negara-negara berkembang Eropa memilih untuk tidak menurunkan tingkat suku bunga atau menurunkan tingkat suku bunga secara bertahap, contoh Hungaria. Lain halnya dengan respon pemerintah Turki yang memutuskan untuk mengikuti langkah-langkah pemerintah sebagian Negara-negara maju dengan menurunkan tingkat suku bunga, karena rata-rata neraca keuangan rumah tangga Turki tidak terlalu terekspos dengan depresiasi mata uang domestik, seperti yang terjadi di Hungaria. Di sisi kebijakan fiskal, kelompok Negara berkembang Eropa menghadapi kesulitan untuk memberikan stimulus fiskal serta untuk meningkatkan anggaran belanja Negara. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan permodalan yang tersedia bagi pemerintah untuk melongarkan fiskalnya.

Penyebaran krisis juga merambah ke kawasan Negara-negara di Asia. Aksi penarikan dana investor berimbas kepada bursa-bursa di Asia. Bursa-bursa saham di Asia, seperti Nikkei, Hang Seng, Strait Times, dan IHSG, pun memasuki zona merah

(lihat tabel 1.2). Kekeringan likuiditas di Negara-negara maju, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, yang merupakan salah satu pemasok utama modal asing ke *emerging markets* menyebabkan terganggunya pasokan pendanaan bagi Negara-negara berkembang di benua Asia.

#### IV.4 Dampak Krisis di Kawasan Asia

Saat ini, kekacauan pertumbuhan ekonomi dunia diredam oleh, pertumbuhan ekonomi China dan India tetap positif, sekalipun perekonomian kedua Negara tersebut tidak mampu mendongkrak naik pertumbuhan ekonomi, karena kedua Negara tersebut juga mengalami perlambatan ekonomi. Dalam kasus China dan India, penyebab utama perlambatan ekonomi bukan penurunan ekspor. Karena prosentase konsumsi ekspor produk domestik lebih kecil dibandingkan prosentase konsumsi dalam negeri. Dalam kasus China, kebijakan pemerintah yang agresif dalam mengeluarkan stimulus fiskal agar dapat meningkatkan konsumsi dalam negeri serta investasi di bidang infrastruktur yang berkelanjutan, mengantarkan pertumbuhan ekonomi Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia ini, ke level 6% pada tahun 2009, setelah pada dua tahun sebelumnya mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 13%.<sup>16</sup> Pemerintah China berusaha untuk menyeimbangkan gonjang-ganjing di sektor perumahan dan neraca kredit perusahaan domestik dengan meningkatkan daya beli masyarakatnya.

India, yang juga menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi global di masa krisis, mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4.5% pada tahun 2009, turun drastis dari 9% di tahun 2007<sup>17</sup>. Sedikit berbeda dengan China, India memiliki ruang yang lebih sempit untuk melonggarkan kebijakan makroekonomi yang sudah diterapkan. Hal tersebut diakibatkan oleh berkurangnya pendanaan luar dan investasi terhadap perusahaan dan bank-bank domestik yang mengindikasikan ketatnya arus modal serta penurunan kredit domestik. Nilai hutang publik yang cukup besar juga mempersulit pemerintah India untuk memainkan kebijakan moneter berupa penurunan suku bunga. Pemerintah khawatir akan adanya peningkatan jumlah hutang yang terlalu besar di masa krisis, akan berpotensi menyebabkan kegagalan bayar secara masal atau bahkan

---

<sup>16</sup> IMF, World Economy Outlook, April 2009.

<sup>17</sup> *Ibid*

dapat menyebabkan *bank run* yang nantinya dapat menghancurkan perekonomian India serta memulai krisis baru. Oleh karena itu, instrumen alternatif yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan penurunan ekspor pun menjadi lebih terbatas.

Kondisi perekonomian yang relatif baik di India dan China pada masa krisis ini, tidak terjadi di Negara-negara seperti Hongkong, Singapore, Taiwan dan Korea Selatan. Selain karena ke-empat Negara ini menempatkan konsumsi ekspor sebagai salah satu target utama hasil produksi dalam negeri (terutama Korea Selatan dan Taiwan), namun juga disebabkan oleh peran Negara-negara tersebut, khususnya Singapore dan Hongkong sebagai *financial hub* atau pusat finansial bagi kawasan. Sebagai pusat finansial, baik Hongkong maupun Singapore memiliki level *exposure* yang tinggi terhadap lalu lintas pergerakan modal internasional. Sehingga, dimasa krisis kredit seperti yang terjadi sekarang ini, kedua Negara tersebut ikut terseret dalam arus krisis.

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN pun ikut terkena dampak penyebaran krisis. Kombinasi antara penurunan permintaan global terhadap produksi ekspor Negara-negara tersebut dan ketatnya likuiditas global menjadikan pertumbuhan ekonomi kawasan secara keseluruhan menurun, dari 6% pada tahun 2007 menjadi 0% pada tahun 2009, sekalipun Indonesia berhasil tumbuh 4.4% di tahun 2009. Walaupun Negara-negara tersebut ikut terpengaruh lemahnya perdagangan internasional, namun komposisi komoditas ekspor mereka yang berupa *durable goods*, yang mengalami penurunan permintaan secara drastis akibat turunnya permintaan akan mobil; komputer; dan alat-alat elektronik lainnya, tidak terlalu besar.

Berbagai langkah antisipatif coba untuk dilakukan oleh pemerintah Negara-negara di benua Asia ini. Bagi pemerintah yang memiliki cadangan cukup besar dan ruang untuk melonggarkan kebijakan moneter, seperti China dan Jepang, langkah untuk memangkas suku bunga, merevisi peraturan dana cadangan perbankan mengeluarkan stimulus fiskal dan mendorong pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meredam efek rambatan krisis *Subprime Mortgage* dan menaikkan tingkat konsumsi dalam negeri guna menjaga volume produksi dalam negeri agar tidak mengancam kondisi finansial perusahaan yang kemudian dapat berujung pada PHK dan masalah pengangguran tinggi.

Sedangkan bagi Negara-negara yang tidak bisa terlalu melonggarkan kebijakan moneternya dengan menurunkan suku bunga, seperti India, memilih untuk melonggarkan peraturan perbankan yang berkaitan dengan dana cadangan, menyuntikan kapital dalam jumlah besar ke pasar, melonggarkan kontrol terhadap arus modal masuk untuk memenuhi kebutuhan akan mata uang asing, serta memperkenalkan metode *swap* valuta asing kepada para bank.

Negara-negara Asia lainnya, seperti Kamboja, Korea Selatan, Malaysia, Singapore, Filipina, dan Thailand juga melakukan pemotongan suku bunga dan menyuntikan sejumlah kapital untuk memperlancar likuiditas dalam negeri. Dalam sektor finansial, pemerintah Negara-negara Asia mengambil langkah untuk melebarkan jaminan deposito (Hongkong, Malaysia, Singapore, Thailand) atau menaikan limit deposito yang dijamin (Indonesia dan Filipina). Di India dan Jepang, pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan mengeluarkan kebijakan untuk menaikan volume kapital pada sistem finansial mereka. Sedangkan di China dan Korea Selatan, pemerintah masing-masing akan memberikan dukungan kepada sektor perusahaan guna menahan efek buruk krisis agar tidak terlalu meluas ke sektor ril sehingga mengancam kesejahteraan.

#### **IV.5 Dampak Krisis Terhadap Kelompok Negara-negara CIS**

Dari berbagai kawasan di dunia, kelompok Negara yang mengalami dampak krisis paling buruk adalah Negara-negara persekutuan atau *Commonwealth Independent State* (CIS). Perekonomian Negara-negara tersebut menghadapi 3 tantangan besar sekaligus, yaitu kekacauan sktor finansial, penurunan permintaan terhadap ekspor dari Negara-negara maju, dan kejatuhan harga komodity, terutama harga sumber-sumber energi.

Kejatuhan pasar finansial di perekonomian CIS menunjukkan adanya *capital outflow* yang sangat besar terjadi dan meninggalkan persusahaan non-finansial maupun sistem perbankan kelompok Negara CIS. Pada masa sebelum krisis terjadi, hampir seluruh Negara yang termasuk dalam kelompok ini dengan pengecualian Azerbaijan, Tazikistan dan Turkmenistan sangat tergantung dengan pemodalan luar negeri untuk

mempertahankan permintaan domestik terhadap kredit.<sup>18</sup> Ketika krisis mulai merambah, baik perusahaan non-finansial maupun perbankan sekejap mengalami kesulitan untuk memperbaharui pendanaan dari para investor yang lebih memilih untuk berpindah ke aset yang dinilai lebih aman. Langkah para investor ternyata diikuti pula oleh rumah tangga yang lebih memilih untuk menyimpan kekayaannya dalam aset dengan denominasi dollar dibandingkan dengan mata uang asing. Negara-negara seperti Rusia, Kazakhstan, Belarusia dan Ukraina adalah Negara-negara yang terkena pukulan berat akibat penarikan devisa negara secara besar-besaran yang berlangsung hingga dua kali untuk meredam gejolak pasar uang. Oleh sebab itu, pemerintah Belarusia dan Ukraina dan kemudian diikuti pula oleh Armenia, beralih kepada IMF untuk meminta bantuan *financing* guna memenuhi kewajiban eksternal.

Pada saat yang bersamaan dengan berawalnya krisis finansial, penurunan permintaan ekspor dan harga komoditi global akibat pelemahan aktivitas ekonomi terutama di Negara-negara maju, secara otomatis mempengaruhi kondisi devisa Negara-negara yang sebelum krisis menikmati limpahan devisa dari hasil ekspor komoditi, seperti Rusia, Kazakhstan dan Ukraina. Penurunan angka ekspor sangat berpengaruh dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi Negara pengekspor dan posisi neraca pembayaran dari surplus menjadi *zero balance* ataupun defisit akibat jumlah hutang luar negeri dalam denominasi mata uang asing. Pelemahan aktivitas ekonomi di Negara-negara lain turut mempengaruhi penurunan devisa pemerintah bagi Tajikistan, Republik Kyrgyz dan Uzbekistan yang mengandalkan ekspor tenaga kerja sebagai salah satu pemasukan utama.

Permasalahan berikutnya yang dihadapi oleh kelompok CIS adalah peningkatan total nilai nominal hutang luar negeri. Melonjaknya hutang luar negeri berkontribusi untuk semakin menekan posisi neraca pembayaran pemerintah Negara-negara eks blok timur ini.. Karena dengan cadangan devisa yang menurun dan surutnya permodalan asing secara otomatis menggiring mata uang dalam negeri ke arah depresiasi mata uang, sehingga berpotensi untuk lebih menaikkan nilai nominal hutang luar negeri para perusahaan non-finansial yang harus dibayar. Kondisi tersebut diperburuk dengan sistem mata uang asing *pegging* yang umum diterapkan dimana pihak otoritas Negara-

---

<sup>18</sup> *ibid*



negara CIS “berkewajiban” untuk mempertahankan nilai mata uang domestiknya. Selain itu, dilema yang dialami oleh pemerintah dan bank sentral Negara-negara CIS berpotensi untuk semakin menurunkan tingkat kepercayaan investor, baik untuk merestrukturisasi hutang maupun untuk kembali mengalirkan dananya. Dalam tekanan krisis yang semakin meningkat, pemerintah Rusia dan Kazakhstan pada akhirnya memilih untuk membiarkan mata uang domestiknya terdevaluasi, setelah sebelumnya berusaha untuk tetap menahan nilai mata uang domestik pada nilai yang sudah ditentukan. Ukraina dan Belarus, bahkan sudah mengalami depresiasi mata uang pada fase-fase awal krisis. Bagi Negara-negara yang mencatat surplus besar sebelum krisis memiliki keuntungan untuk dapat melaksanakan kebijakan fiskal yang lebih longgar, namun untuk Negara-negara yang tidak mencatat surplus di neraca pembayarannya lebih mengacu kepada langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perbankan melalui jaminan terhadap publik, penerapan dana cadangan minimum, rekapitalisasi dan nasionalisasi

**Tabel 4.5**  
**Prosentase Perubahan Pertumbuhan PDB Negara-negara CIS (dalam %)**

	Real GDP		
	2007	2008	2009
<b><i>Commonwealth of Independent States</i></b>	<b>8,6</b>	<b>5,5</b>	<b>-5,1</b>
Rusia	8,1	5,6	-6,0
Ukraina	7,9	2,1	-0,8
Kazakhstan	8,9	3,2	-2,0
Belarus	8,6	10,0	-4,3
Turkmenistan	11,6	9,8	6,9
Azerbaijan	23,4	11,6	2,5
<b><i>Low-income CIS countries</i></b>	<b>14,3</b>	<b>8,8</b>	<b>2,7</b>
Armenia	13,8	6,8	-5,0
Georgia	12,4	2,0	1,0
Republik Kyrgyz	8,5	7,6	0,9
Moldova	4,0	7,2	-3,4
Tajikistan	7,8	7,9	2,0
Uzbekistan	9,5	9,0	7,0

Sumber: IMF World Economy Outlook

#### **IV.6 Krisis dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Australia, Selandia Baru dan Kanada**

Dampak krisis 2008 juga terlihat pada aktivitas ekonomi Negara-negara seperti Australia, Canada dan New Zealand. Kelompok rumah tangga di ketiga Negara tersebut merasakan penurunan kekayaan akibat penurunan pasar saham dan harga rumah yang menjadi alat investasi utama. Pada tahun-tahun sebelum krisis, dimana harga komoditi, makanan, dan mineral mengalami kenaikan, Negara-negara tersebut ikut merasakan aliran devisa yang cukup besar untuk menopang pertumbuhan rata-rata 5 tahun sebelum 2008, sebesar 2.5%-4%. Kemudian, penurunan harga komoditi, berkurangnya kemampuan konsumsi domestik dan penurunan akan permintaan ekspor berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang melambat. Khusus untuk Australia dan New Zealand, risiko tambahan yang mengintai adalah kewajiban luar negeri yang masing-masing mencapai 60% dan 90% dari pemasukan, namun kewajiban tersebut rata-rata berada dalam bentuk mata uang lokal dan terlindungi dari fluktuasi kurs mata uang.<sup>19</sup>

Perpaduan antara surplus neraca pembayaran dan penerapan kebijakan moneter dan fiskal yang konvensional berhasil menempatkan posisi Australia, Canada dan New Zealand dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan Negara-negara dari kawasan lain. Dampak krisis 2008 berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi tetap ada, hanya saja tidak seburuk kelompok lain, dan di samping itu langkah-langkah kebijakan yang dapat dimainkan oleh pemerintah lebih beragam. Penurunan tingkat suku bunga sudah dilakukan dan masih dapat dilakukan lebih agresif lagi.

Negara-negara Amerika Latin tampaknya tidak seberuntung Australia, Canada maupun New Zealand. Beberapa faktor yang menyebabkan dampak krisis merambah cukup parah di kawasan ini adalah: penurunan permintaan ekspor dari Amerika Serikat yang merupakan mitra dagang utama Negara-negara yang berada dalam kawasan tersebut: penurunan harga komoditas global yang merupakan produk ekspor andalan sejumlah perekonomian besar kawasan, seperti: Argentina, Chile, Mexico, Brazil dan Venezuela; kenaikan biaya kredit; penurunan arus modal asing yang menjadi salah satu tumpuan penggerak ekonomi; dan berkurangnya pemasukan Negara dari sektor pariwisata, menjadikan Negara-negara Amerika Latin berada dalam posisi yang hampir

---

<sup>19</sup> *ibid*, hlm 108.

serupa dengan kelompok Negara CIS. Meski demikian, posisi neraca sektor rumah tangga dan swasta masih relatif lebih baik ketimbang kelompok Negara CIS. Hal ini dikarenakan, sektor-sektor tersebut tidak terlalu terhubung dengan sistem perbankan di Negara-negara maju seperti layaknya sistem perbankan di Negara-negara CIS. Oleh karena itu, penurunan pertumbuhan ekonomi tidak sedrastis yang dialami oleh Negara eks Uni Soviet.

#### **IV.7 Krisis Terhadap Kinerja Perekonomian Negara-negara kawasan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia**

Dampak krisis finansial global menyebar dengan cepat ke kawasan Amerika Latin dan Karibia setelah pertengahan September 2008.<sup>20</sup> Di sektor keuangan, Indeks pasar saham lokal di kawasan tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dan seperti yang terjadi pada Negara-negara berkembang lainnya, mata uang lokal pun mengalami depresiasi yang besar, terutama pada Negara-negara pengekspor yang menerapkan rezim mata uang *floating*. Biaya pemberian kredit menjadi lebih mahal, khususnya bagi bank-bank berskala kecil dan menengah di Argentina, Ekuador dan Venezuela.

Sedangkan di sektor perekonomian ril, dampak dari krisis finansial global 2008 terhadap Negara-negara Amerika Latin meningkat intensitasnya akibat penurunan harga komoditi global yang sedikit banyak diakibatkan oleh penurunan permintaan dari Negara-negara maju, serta pelemahan tingkat konsumsi terhadap produk-produk ekspor Negara-negara tersebut. Namun, karena beberapa Negara tersebut memiliki posisi neraca yang kuat sebelum terjadinya krisis dan penerapan kebijakan makroekonomi yang cukup baik, untuk sementara, mampu melindungi perekonomian di kawasan itu dari resesi yang dalam. Di antara Negara-negara pengekspor, Mexico dapat dikatakan sebagai Negara yang menderita efek krisis paling besar karena keterkaitannya yang relatif lebih erat dengan perekonomian Amerika Serikat. Khusus untuk kelompok Negara-negara Amerika Latin seperti Antigua dan Barbuda, Kepulauan Bahama, Barbados dan Jamaika yang menggantungkan perekonomiannya dari industri pariwisata, krisis yang terjadi di Amerika Serikat mempengaruhi volume kedatangan

---

<sup>20</sup> *ibid*

turis ke Negara-negara tersebut, sehingga dampak yang dirasakan cukup besar dibandingkan dengan kelompok Negara Amerika Latin pengekspor.

Sikap pemerintah Negara-negara Amerika Latin dalam menyikapi krisis finansial global 2008 berbeda-beda mengingat perbedaan posisi fiskal di kawasan tersebut. Bagi Brazil, Chili, Peru dan Mexico yang memiliki tingkat hutang public yang tidak terlalu tinggi, kebijakan untuk melonggarkan fiskal dapat digunakan sebagai substitusi dari hilangnya arus modal asing. Namun, bagi Negara-negara yang tidak memiliki cadangan devisa besar, penurunan pendapatan hasil ekspor komoditi sangat membatasi ruang gerak fiskal pemerintah, terlebih lagi, ruang gerak tersebut dipersempit dengan adanya kebijakan pemerintah yang tidak bisa terlalu leluasa memainkan instrumen moneter menimbang tingkat inflasi yang cukup tinggi pada Negara-negara tersebut pada masa pra krisis. Hal ini terlihat dari kehati-hatian bank sentral dalam memainkan instrumen tingkat suku bunga. Brazil, Chili, Mexico dan Peru baru memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga setelah melihat adanya tendensi yang condong ke arah penurunan inflasi dalam negeri.

**Tabel 4.6**  
**Prosentase Perubahan Pertumbuhan PDB Negara Amerika Latin**  
**(dalam %)**

	Real GDP			
	2007	2008	2009	2010
<b>Western Hemisphere South America and Mexico</b>	<b>5,7</b>	<b>4,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>1,6</b>
Argentina	8,7	7	-1,5	0,7
Brazil	5,7	5,1	-1,3	2,2
Chile	4,7	3,2	0,1	3,0
Colombia	7,5	2,5	0,0	1,3
Equador	2,5	5,3	-2,0	1,0
Meksiko	3,3	1,3	-3,7	1,0
Peru	8,9	9,8	3,5	4,5
Uruguay	7,6	8,9	1,3	2,0
Venezuela	8,4	4,8	-2,2	-0,5

Sumber: *World Economy Outlook, 2009*

#### IV.8 Dampak Krisis Terhadap Kawasan Timur Tengah

Setelah meikmati beberapa tahun dari periode *oil boom* yang sampai membawa harga minyak dunia menembus angka US\$ 140/barrel, kini, kawasan Timur Tengah dihadapkan pada proyeksi ekonomi yang temaram. Kejatuhan harga minyak dunia secara drastis, otomatis mempengaruhi kawasan yang terkenal akan kekayaan sumber energinya. Kelangkaan modal asing pun ikut mempersulit kondisi perekonomian kawasan. Para investor asing yang memperkirakan kelanjutan penurunan permintaan terhadap minyak dunia akibat krisis, dianggap sebagai salah satu pemicu penghentian investasi pengolahan maupu eksplorasi minyak. Tidak hanya investasi ke dalam kawasan yang bermasalah, tapi juga investasi keluar yang dilakukan melalui pembentukan SWF (*Sovereign Wealth Funds*). Volume SWF yang beredar di Negara-negara maju cukup banyak, dan sejak berhembusnya krisis *Subprime Mortgage*, investasi Negara-negara kaya minyak ini juga menderita kerugian. Di samping itu, kondisi sektor properti dan pasar modal juga tak luput dari ancaman. Untuk Negara-negara seperti mesir, Libanon dan Yordania yang juga bergantung kepada pemasukan Negara dari industri pariwisata maupun ekspor tenaga kerja, menerima dampak krisis yang berat, karena berkurangnya kunjungan pariwisata akibat penurunan kekayaan sektor rumah tangga di Negara-negara yang kerap menjadi “pengimpor” turis, serta kurangnya permintaan akan tenaga kerja imigran akibat melemahnya aktivitas ekonomi.

Di antara Negara-negara yang tergabung dalam kawasan Timur Tengah, Qatar adalah yang diperkirakan akan bernasib lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Sebagai Negara pengekspor gas alam, Qatar diproyeksikan akan tumbuh sekitar 18% di tahun 2009, naik 2% dari tahun 2008.<sup>21</sup> Hal ini disebabkan oleh meningkatnya produksi gas alam hingga 2 kali lipat. Sedangkan di kalangan Negara-negara pengekspor minyak, Uni Emira Arab diperkirakan yang terkena imbas krisis paling parah. Sebagai salah satu pusat finansial, Uni Emirat Arab mengalami arus modal keluar yang tinggi sehingga menyebabkan kontraksi likuiditas yang cukup hebat, serta mengalami penurunan harga saham dan properti yang sebelum krisis sempat merasakan periode *boom*. Libanon adalah Negara yang diperkirakan paling menurun kinerja perekonomiannya di kawasan Timur Tengah. Ketergantungannya terhadap ketersediaan

---

<sup>21</sup> *ibid*

modal asing menggiring biaya kredit di Negara ini menjadi mahal. Lebih lanjut lagi, salah satu sumber pendapatan pemerintah yang berasal dari ekspor tenaga kerja juga menurun tajam, sehingga pemerintah Lebanon akhirnya kesulitan untuk melonggarkan kebijakan fiskalnya guna meredam kontraksi modal.

Bank sentral Negara-negara Timur Tengah memutuskan untuk memotong tingkat suku bunga dan menurunkan cadangan dana minimum guna memperlancar likuiditas di pasaran. Bagi Negara-negara dengan sistem keuangan *pegging*, seperti: Bahrain, Kuwait, Libya, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah dan Uni Emirat Arab, merasakan keuntungan dari kelonggaran moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Langkah-langkah fiskal pun tetap dilakukan oleh pemerintah untuk melanjutkan proyek-proyek investasi bidang infrastruktur, sekalipun menggerus cadangan devisanya. Keputusan pemerintah untuk menambah kapital bagi Bank yang dinilai membutuhkan dan menyediakan likuiditas diharapkan dapat meredam eksekusi dari krisis finansial global kali ini

**Tabel 4.7**  
**Prosentase Perubahan Pertumbuhan PDB Kawasan Timur Tengah (%)**

	Real GDP			
	2007	2008	2009	2010
<b>Timur Tengah</b>	<b>6,3</b>	<b>5,9</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>
<b>Oil exportes</b>	<b>6,2</b>	<b>5,6</b>	<b>2,2</b>	<b>3,7</b>
Iran	7,8	4,5	3,2	3,0
Saudi Arabia	3,5	4,6	-0,9	2,9
UEA	<b>6,3</b>	<b>7,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,6</b>
Kuwait	<b>2,5</b>	<b>6,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>2,4</b>
<b>Mashreq</b>	<b>6,7</b>	<b>6,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>
Mesir	7,1	7,2	3,6	3,0
Syiriah	4,2	5,2	3,0	2,8
Jordan	6,6	6,0	3,0	4,0
Lebanon	7,5	8,5	3,0	4,0

Sumber: *World Economy Outlook, 2009*

#### IV.9 Dampak Krisis Terhadap Benua Afrika

Negara-negara Afrika yang memiliki hubungan finansial relatif lemah dengan Negara-negara maju, tetap terkena imbasnya. Dalam sebagian besar kasus Negara-negara Afrika, perambatan krisis terjadi melalui jalur perdagangan. Penurunan permintaan terhadap ekspor produk-produk Afrika, ekspor komoditi global (bagi Negara yang kaya akan sumber-sumber energi), dan ekspor tenaga kerja, secara signifikan telah memberikan pengaruh terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi. Bank-bank domestik pun terancam kondisi neracanya dengan menurunnya aliran modal asing. Tambahan bagi Negara seperti: Ghana, Kenya, Nigeria, Afrika Selatan dan Tunisia, ketatnya kredit global menyebabkan aliran investasi asing langsung berkurang.

Seperti halnya yang terjadi di kawasan lain, posisi neraca pemerintah melemah sejak dampak krisis merasuki benua ini. Kelompok Negara yang sebelum di krisis mulai menumpuk devisa dengan mengintensifkan ekspor komoditi global dan bahan pangan, dihadapkan pada proyeksi penurunan pendapatan Negara yang cukup besar mengingat lemahnya ekspor komoditi dalam segi volume maupun harga akibat turunnya minat konsumsi global. Surutnya pasokan pendanaan asing terhadap perekonomian kawasan yang mulai tumbuh akan berdampak pada pelaksanaan program-program pembangunan Negara. Namun dari sekian permasalahan ekonomi yang melanda, tantangan terbesar bagi kawasan ini adalah bilamana krisis global 2008 berlangsung dalam kurun waktu yang panjang adalah pendapatan hasil ekspor yang terus menurun dan menggerus cadangan dana pemerintah Negara-negara Afrika hingga akhirnya mengancam kestabilan jaringan pengaman sosial pemerintah yang kemudian tidak lagi mampu menahan para penduduk Afrika untuk tidak kembali terjatuh ke area di bawah garis kemiskinan.

**Tabel 4.8**  
**Prosentase Perubahan Pertumbuhan PDB Kawasan Timur Tengah (%)**

	Real GDP			
	2007	2008	2009	2010
<b>Afrika</b>	<b>6,2</b>	<b>5,2</b>	<b>2,0</b>	<b>3,9</b>
<b><i>Maghreb</i></b>	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>
Algeria	3,0	3,0	2,1	3,9
Maroko	2,7	5,4	4,4	4,4
Tunisia	6,3	4,5	3,3	3,8
<b><i>Sub-Sahara</i></b>	<b>6,9</b>	<b>5,5</b>	<b>1,7</b>	<b>3,8</b>
<b><i>Horn of Africa</i></b>	<b>10,7</b>	<b>8,9</b>	<b>5,1</b>	<b>5,7</b>
Ethopia	11,5	11,6	6,5	6,5
Sudan	10,2	6,8	4,0	5,0
<b><i>Great Lakes</i></b>	<b>7,3</b>	<b>6,1</b>	<b>4,3</b>	<b>5,1</b>
Congo	6,3	6,2	2,7	5,5

Kenya	7,0	2,0	3,0	4,0
Tanzania	7,1	7,5	5,0	5,7
Uganda	8,6	9,5	6,2	5,5
<b>West and central Africa</b>	<b>5,6</b>	<b>4,9</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>
Ghana	6,1	7,2	4,5	4,7
Nigeria	6,4	5,3	2,9	2,6
<b>CFA franc zone</b>	<b>4,6</b>	<b>4,1</b>	<b>2,6</b>	<b>3,4</b>
Kamerun	3,5	3,4	2,4	2,6
Pantai Gading	1,6	2,3	3,7	4,2
<b>Afrika Selatan</b>	<b>5,1</b>	<b>3,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,9</b>

Sumber: *World Economy Outlook, 2009*

#### IV.10 Dampak Krisis Terhadap Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan

Krisis finansial global tahun 2008 memberikan dampak yang sangat cepat dan sangat dahsyat terhadap hampir seluruh perekonomian yang ada di dunia. Dapat dilihat bahwa hampir tidak ada satu pun Negara yang tergabung dalam struktur perdagangan internasional yang tidak terkena imbas dari krisis ini, baik kelompok Negara maju, kelompok Negara industri baru, maupun kelompok Negara berkembang. Pada sub bab-sub bab sebelumnya sudah dijabarkan pengaruh krisis global ini terhadap angka dan indikator pertumbuhan ekonomi secara makro dan lintas sektor (finansial dan ril). Namun ancaman yang sebenarnya dari krisis ini adalah melonjaknya angka pengangguran yang apabila tidak segera diatasi akan berujung kepada meningkatnya angka kemiskinan di berbagai Negara.

Pelemahan aktivitas ekonomi di Negara-negara maju juga berdampak pada ketersediaan lapangan kerja dan meningkatnya jumlah pengangguran. Permasalahan ketenagakerjaan memang kerap menyertai suatu krisis, akan tetapi krisis global kali ini membawa dampak yang lebih buruk, karena luasnya dampak krisis, sehingga mengurangi permintaan akan ekspor tenaga kerja, dan juga pelemahan perekonomian domestik yang mengurangi penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Di samping itu, kerugian perusahaan-perusahaan transnasional yang sebelumnya kerap menjalankan operasionalnya melalui *outsourcing* tenaga kerja di Negara-negara yang berpenduduk banyak, juga turut menambah jumlah pengangguran.

Hal ini juga terlihat pada Negara-negara maju, khususnya di Eropa. Perusahaan-perusahaan besar yang menjadi sumber penghasilan bagi ribuan karyawan di Eropa



dan Amerika Serikat, kini gulung tikar. Pada Desember 2008, Bank of America mengumumkan bahwa kurang lebih sekitar 30.000-50.000 karyawan bank tersebut akan menjadi pengangguran, setelah sebelumnya Citigroup mengumumkan akan memecat 10.000 pekerjanya<sup>22</sup>. Fenomena pemecatan masal juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Inggris. Berdasarkan pemberitaan BBC, sederetan nama seperti: J Sainsbury, TT electronics, Hammonds Support System diprediksi akan merumahkan 900 karyawan dengan jumlah masing-masing 200 karyawan J Sainsbury; 200 karyawan Hammonds Support System, dan 500 karyawan TT electronics.

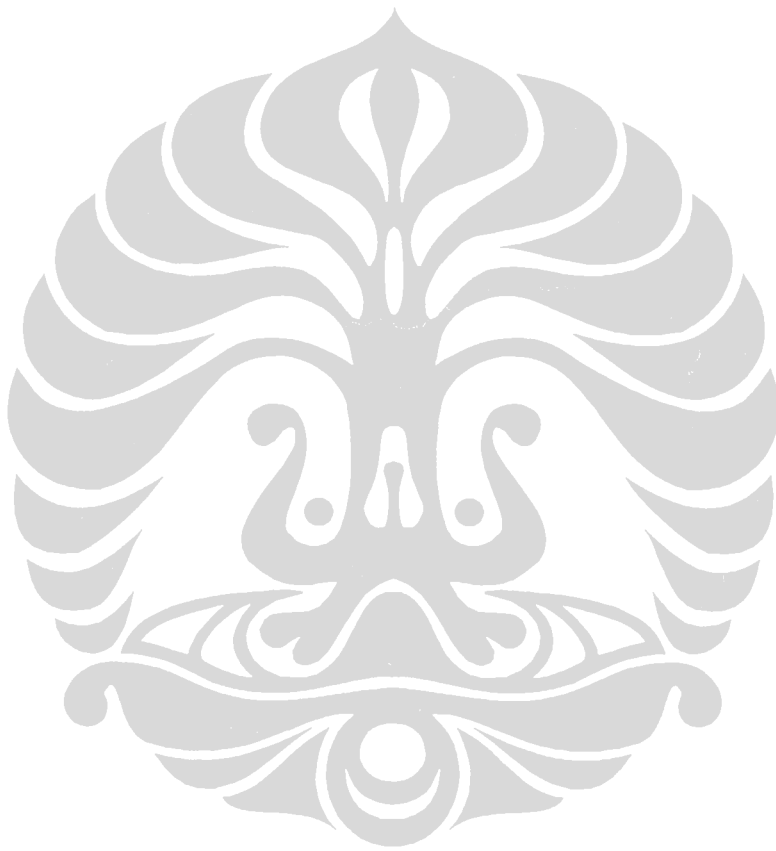
Pada grafik IV.5 terlihat bahwa tingkat pengangguran di berbagai Negara meningkat. Pada kawasan Uni Eropa, angka pengangguran menembus 10% di tahun 2009 yang merupakan angka pengangguran tertinggi sejak tahun 1997. Kelompok Negara-negara industri baru juga mengalami kenaikan tingkat pengangguran. Prosentase tingkat pengangguran di kelompok tersebut pada tahun 2009, hampir menyamai prosentase angka pengangguran ketika kelompok tersebut terkena imbas krisis finansial Asia tahun 1997. Negara-negara maju, pada tahun 2009, yang pada umumnya memiliki angka pengangguran relatif stabil, mencatat tingkat *unemployment* yang cukup tinggi. Pada grafik tersebut, dapat juga dilihat bagaimana seberapa besar pengaruh krisis 2008 terhadap tingkat pengangguran di berbagai Negara dibandingkan dengan krisis besar yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Permasalahan tenaga kerja, memunculkan problema lain yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat banyak. Negara-negara pun ditantang untuk dapat menerbitkan kebijakan-kebijakan serta mengelola cadangan dana yang dimiliki dengan tujuan tidak hanya menghentikan kontraksi pertumbuhan ekonomi, namun juga menjaga kesejahteraan sosial agar kemudian permasalahan ini tidak merambat ke sektor-sektor lain, seperti sosial, politik dan keamanan.

Nampaknya krisis finansial global ini memberikan eksese yang negatife pada perekonomian global khususnya sektor finansial maupun sektor ril hal ini terjadi karena memang tidak bisa dipungkiri lagi sistem kapitalisme sistem pasar bebas memiliki ciri khas saling mempengaruhi dan ketergantungan antar Negara-negara. Oleh karena itu

---

<sup>22</sup><http://money.cnn.com/2008/11/14/news/companies/citigroup layoffs/index.htm?postversion=2008111407> dan <http://www.newsobserver.com/business/story/1400390.html>

krisis *subprime mortgage* yang mengakibatkan krisis finansial di Negara Amerika Serikat memberikan dampak yang sangat dasyat terhadap tatanan ekonomi global baik sektor finansial maupun sektor riil. Bisa dilihat bagaimana krisis yang terjadi di AS akhirnya juga menyebabkan krisis di seluruh belahan dunia.



## BAB V

### EKSES TERHADAP TATA EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

Saat ini, Negara-negara di dunia berada di tengah ancaman munculnya permasalahan baru akibat krisis finansial global, yaitu instabilitas sosial-politik dalam ranah domestik dan internasional. Sejarah membuktikan bahwa krisis ekonomi dengan magnitud yang dahsyat dapat mempengaruhi kestabilan politik dan sosial sebuah negara, walaupun tidak selalu. Krisis finansial yang melanda kawasan Asia pada tahun 1997 merupakan salah satu contoh kasus dari adanya keterkaitan antara permasalahan ekonomi dan kekisruhan politik-sosial. Adanya keterkaitan tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dianggap tidak mampu dalam menghentikan dampak krisis yang menyengsarakan kehidupan ekonomi mereka. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, kesulitan masing-masing rumah tangga dalam mencukupi kebutuhan utama, kesehatan dan pendidikan sehingga berujung pada meningkatnya kriminalitas pada suatu negara adalah beberapa faktor yang apabila tidak segera ditanggulangi dapat memicu keresahan sosial. Ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi perekonomian ditujukan kepada pemerintah yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung-jawab untuk membawa masyarakat keluar dari kesengsaraan tersebut. Kondisi sosial yang labil dapat menjadi "lahan subur" bagi pergolakan politik dalam negeri dan bukan sesuatu hal yang mustahil bahwa sebuah krisis finansial akhirnya berdampak pada kemunculan sebuah rezim politik baru. Lantas apa dampaknya dalam ranah politik internasional? Pergantian sebuah rezim politik di sebuah negara yang diikuti oleh aksi kekerasan dapat memicu terjadinya hal yang sama di Negara-negara sekitar. Pergantian rezim tersebut seakan dipercaya sebagai salah satu jawaban bagi masyarakat untuk keluar dari kesengsaraan ekonomi dan layaknya rantai yang terus bergulir, kekisruhan politik memperburuk iklim investasi yang pada gilirannya akan semakin menekan kondisi perekonomian Negara atau bahkan kawasan tersebut. Mata rantai aksi dan reaksi tersebut akan berhenti ketika pemerintah dengan segala instrumen yang dimiliki dapat menghentikan kekisruhan politik atau memulihkan stabilitas nasional pasca terjadinya pergolakan politik hebat.

Memang benar bahwa tidak selamanya kemunculan krisis ekonomi selalu diikuti oleh kekerasan sosial dan kekacauan politik, namun melihat eratnya keterkaitan antara bidang ekonomi dan politik serta pengalaman dari krisis finansial Asia tahun 1997 membuktikan bahwa bahaya itu tetap ada dan membayangi setiap Negara yang tidak mampu mengendalikan dampak dari sebuah krisis. Pengalaman krisis finansial Asia tahun 1997 seakan menjadi peringatan bagi tiap-tiap negara untuk dengan sesegera mungkin menyelamatkan perekonomiannya masing-masing.

Indikasi-indikasi yang dapat mengarah pada suatu ketidakstabilan politik, baik di sisi domestik maupun internasional mulai membayangi melihat besarnya skala krisis yang terjadi saat ini dan kemungkinan lamanya pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan global dari krisis finansial 2008. Penjelasan pada bab sebelumnya menyebutkan bahwa krisis finansial 2008 mulai menggerogoti tolak ukur kemajuan ekonomi Negara-negara di dunia. Sebagai contoh Rusia, negara pengspor komoditi global yang sempat menikmati kenaikan harga minyak pada tahun 2007, diproyeksikan mengalami peningkatan angka pengangguran mencapai 12% dan sekitar 5 juta penduduk negara bermata uang Rubel ini akan berada di bawah garis kemiskinan pada tahun ini.<sup>1</sup>Iran yang juga merupakan negara pengspor komoditi global diperkirakan mengalami penurunan pendapatan hasil ekspor gas dan minyak dari \$82 juta menjadi \$33 juta. Dengan kisaran harga minyak bumi sekarang ini, Iran sudah mengalami defisit neraca.<sup>2</sup>Negara-negara di benua Afrika, seperti Republik Congo dan Afrika Tengah mulai mengalami permasalahan sosial. Pemerintah Afrika Tengah sudah mengalami kesulitan untuk membayar gaji para pegawai pemerintahan, sedangkan pemerintah Congo mulai mengalami kesulitan untuk mengimpor kebutuhan-kebutuhan primer bagi masyarakatnya sebagai akibat dari penurunan cadangan devisa yang drastis. Dalam kondisi likuiditas seperti sekarang ini, sulit bagi Negara-negara di Afrika untuk mendapatkan bantuan dari Negara-negara donor demi menopang kesejahteraan rakyat mereka dan hal ini semakin memperburuk kondisi perekonomian kawasan tersebut.

Pakistan, negara yang sedang menghadapi ancaman stabilitas keamanan domestik, kini menghadapi resiko disintegrasi yang lebih hebat akibat berkurangnya

---

<sup>1</sup> Roger C. Altman, *Foreign Affairs Volume 88 No.4*, July/August 2009, hlm. 6.

<sup>2</sup> *ibid*

kemampuan pemerintah untuk menekan gejala keresahan sosial. Negara-negara Uni Eropa pun tidak luput dari permasalahan politis. Kesenjangan ekonomi meningkat seiring dengan penolakan Inggris Raya, Perancis dan Jerman terhadap permintaan bantuan dari Negara-negara Uni Eropa lainnya dan tidak adanya kesepakatan mengenai kebijakan penanggulangan krisis. Permasalahan Uni Eropa tersebut melemahkan persatuan antara Negara-negara Uni Eropa.

Sementara masing-masing negara, termasuk Amerika Serikat, sibuk mencari jalan keluar bagi perekonomian domestiknya, polarisasi dan tatanan Ekonomi Politik Internasional global semakin bergerak menjauh dari konsep uni polar. Tidak hanya itu, arus globalisasi yang mempromosikan keterbukaan pun mengalami kemunduran seiring dengan menurunnya aliran modal dan frekuensi perdagangan internasional, serta meningkatnya kebijakan nasionalisasi perekonomian dan proteksionisme yang diterapkan masing-masing Negara untuk melindungi penyebaran dampak krisis finansial global.

Krisis finansial global 2008 yang berawal dari Amerika Serikat memberikan dampak yang luar biasa terutama bagi Negara-negara yang mengadopsi model perekonomian Amerika Serikat yang pada waktu sebelum terjadinya krisis finansial 2008, dianggap sebagai "solusi" bagi negara yang menginginkan pertumbuhan dan kemajuan. Ketertarikan masyarakat dan pemerintah berbagai negara terhadap model ekonomi Amerika Serikat ternyata menjadi "bumerang", sedangkan Negara-negara yang sektor finansialnya tidak terlalu terekspos seperti China, India dan Indonesia ternyata terbukti cukup sukses dalam menghadapi dampak krisis. Model perekonomian kapitalis ala China yang mempromosikan keterbukaan perdagangan dengan tetap membatasi secara ketat keterbukaan sektor finansial terbukti cukup ampuh menangkal krisis finansial global. Keberhasilan China untuk tetap menumbuhkan perekonomiannya. Perbedaan kondisi ekonomi antara Negara-negara yang mengadopsi model ekonomi Amerika Serikat dengan Negara-negara seperti China dan India yang tidak mengekspos sektor finansialnya, mendorong pemerintah untuk meninggalkan prinsip perekonomian Amerika Serikat.

Pemerintah Negara-negara di dunia, tak terkecuali di Amerika Serikat dan Negara-negara kawasan Eropa mulai memperbesar peran negara dalam mengatur

perekonomian, meningkatkan nasionalisasi badan-badan usaha, mempromosikan konsumsi produk domestik dan subsidi ekspor demi mempertajam segi kompetitif, penerapan kebijakan yang cenderung ke arah proteksionisme, seperti meningkatkan tarif bea masuk, tindakan-tindakan diskriminasi terhadap tenaga kerja asing mulai meluas dan arus keputing tenaga kerja imigran pun meningkat. Bank Dunia pun melaporkan adanya penurunan arus barang, jasa dan finansial global.

Selain pergerakan menjauhi tatanan dunia yang uni polar dengan Amerika Serikat sebagai hegemoni tertinggi serta arus balik globalisasi yang berujung pada penurunan intensitas keterbukaan dan peningkatan proteksionisme, krisis finansial global juga mengarah kepada krisis kepemimpinan global, krisis koordinasi dan keselarasan antar negara. Krisis yang berpusat di Amerika Serikat berdampak terhadap penurunan posisi kepemimpinan negara adi daya tersebut di mata internasional. Naiknya Barack Obama yang mendapatkan respon positif dari berbagai negara, namun popularitas dan modal politiknya tetap akan difokuskan untuk mendukung legitimasi kepresidanan Obama secara domestik untuk menstabilkan sektor perbankan dalam negeri, pengaturan anggaran negara dan reformasi bidang kesehatan.<sup>3</sup> Sedangkan, sekalipun China menempati posisi strategis baru yang lebih kuat, tetap saja belum bisa menggantikan peran Amerika Serikat secara utuh dalam kerangka uni polar. Lebih lanjut, tinjauan ke depan terhadap organisasi multilateral seperti G-7 atau G-20, sejauh ini belum mampu menghasilkan kesepakatan yang efektif dalam kaitannya dengan krisis finansial global. Hal ini dikarenakan, Negara-negara yang tergabung dalam organisasi tersebut masih berusaha untuk menyelamatkan perekonomiannya sendiri dari dampak krisis yang lebih parah dan menjaga stabilitas domestik masing-masing negara. Sehingga melihat kondisi Ekonomi Politik Internasional saat ini, nampaknya ada kecenderungan peningkatan instabilitas internasional. Masing-masing negara, termasuk Amerika Serikat, lebih memfokuskan pada urusan domestik dibandingkan dengan urusan internasional dan dengan penurunan posisi strategis Amerika Serikat, himbuan-himbuan serta kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintahan Barack Obama tampaknya tidak terlalu diindahkan lagi oleh Negara-negara lain. Sampai pada titik dimana Negara-negara di dunia dapat mengembalikan stabilitas domestik

---

<sup>3</sup> *ibid*

serta memformulasikan tatanan Ekonomi Politik Internasional pasca krisis finansial global tahun 2008, ancaman terhadap stabilitas internasional seperti konflik Israel-Arab, Afghanistan, Korea Utara, kemiskinan, bahkan perang, terus membayangi.

Ekses krisis finansial global 2008 juga memberikan dorongan kepada Negara-negara diseluruh dunia untuk lebih berkoordinasi saling memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya oleh karena itu peran G 20 memiliki peluang yang lebih baik dibandingkan dengan G 8, walaupun tindakan nyata yang menyertai pertemuan terakhir belum terlihat. Namun Kelompok G 20 memiliki masa depan yang lebih baik karena kelompok ini mewakili 90 persen dari total PDB Dunia. Karena pembahasan mengenai tinjauan ke depan kondisi makroekonomi global mulai harus mempertimbangkan masukan dari emerging economies seperti: Brazil, India, China, Afrika Selatan, karena di masa mendatang negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, China (BRIC) yang akan mendorong peningkatan pertumbuhan PDB dunia. Transisi dari G 8 menjadi G 20 memperluas dan membuka pandangan baru terhadap sistem ekonomi dunia dan permasalahannya. Peran institusi internasional dalam penanggulangan krisis ternyata juga dibutuhkan oleh negara-negara maju. Namun, sejauh mana negara emerging economies dan negara maju dapat menjadi mitra yang seimbang masih merupakan pertanyaan besar.

G 20 dibentuk sebagai repons terhadap krisis finansial pada tahun 1999 dan perkembangan ekonomi internasional yang menindikasikan kurangnya keterwakilan Negara-negara emerging economies dalam diskusi dan pengaturan mengenai ekonomi global. Untuk menjamin adanya kerjasama yang baik antara forum ekonomi dan institusi internasional, maka Managing Director IMF dan President Worldbank juga berpartisipasi dalam rapat G 20 dalam ex-officio basis. Negara ekonomi maju dan berkembang pesat G 20 akan memiliki peran baru sebagai badan tetap koordinator ekonomi dunia. G 20 akan menjalankan peran yang sebelumnya dilakukan G8. Adanya perubahan G 8 menjadi G 20 menandakan Negara negara kaya Amerika Utara dan Eropa secara resmi mengakui mereka tidak lagi mengetahui jawaban bagi semua masalah ekonomi dunia. Digantikannya G 8 dengan G 20 telah menunjukkan adanya pergeseran perekonomian dunia. Sebelumnya, Perekonomian dunia dikendalikan oleh negara-negara maju di benua Amerika dan Eropa. Namun, setelah terjadinya krisis ekonomi global, raksasa-

raksasa ekonomi dari benua Asia seperti China dan India mulai tampil dan ikut mengendalikan perekonomian dunia.

Perubahan G 8 menjadi G 20 menurut Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, menandakan sistem kerja sama ekonomi internasional yang lama sudah berakhir. Perubahan G 8 menjadi G 20 merupakan suatu pengukuhan bahwa berbagai negara pasaran baru telah jauh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tatanan Ekonomi Politik Internasioanal yang membawa Negara-negara yang ingin membangun lebih kuat, ekonomi global lebih seimbang, reformasi sistem keuangan dan mengangkat kemiskinan. Metamorfosa G 8 menjadi G 20 nampaknya memberikan dampak kepada perombakan pengambilan keputusan pada lembaga moneter internasional IMF, yang rencananya akan memberikan suara yang lebih besar kepada Negara-negara yang sedang berkembang yang tergabung dalam G 20.

